



Bondowoso  
**Berkah**  
Berkualitas, Akseleratif, Holistik

# Rencana Strategis 2025 - 2029



**Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bondowoso**

📍 Jl Imam Bonjol No. 13 Kab. Bondowoso 68217

☎ (0332) 42134

✉ [perencanaanbondowoso@gmail.com](mailto:perencanaanbondowoso@gmail.com)

🌐 <https://dinkes.bondowosokab.go.id>

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 yang berpijak pada RPJMD Periode 2025 – 2029 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Dalam Rencana Strategis (Renstra) ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421), dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045.

Kami sepenuhnya menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk itu masukan dan saran

dari semua pihak terkait sampai diharapkan untuk dokumen penyusunan Rencana Strategis (Renstra) baik pada periode ini dan periode berikutnya.

Bondowoso, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Bondowoso



Agus Winarno, SE., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 198008 200312 1 002

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR   | i       |
| DAFTAR ISI   | ii      |
| BAB I    PENDAHULUAN   |         |
| 1.1 Latar Belakang   | 1       |
| 1.2 Dasar Hukum  | 2       |
| 1.3 Maksud dan Tujuan  | 5       |
| 1.4 Sistematika Penulisan  | 7       |
| <br>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN     | <br>8   |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan   | 8       |
| 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan                                     | 8       |
| 2.1.2 Sumber daya Dinas Kesehatan  | 16      |
| 2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan  | 17      |
| 2.1.4 Kelompok sasaran layanan   | 32      |
| 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan                            | 33      |
| 2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan   | 33      |
| 2.2.2 Isu strategis Dinas Kesehatan  | 37      |
| <br>BAB III    TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                            | <br>40  |
| 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2025 - 2029                                       | 44      |
| 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029                                | 44      |
| 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran                                       | 46      |
| 3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran                                 | 47      |
| <br>BAB IV    PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | <br>49  |
| 4.1 Uraian Program   | 49      |
| 4.2 Uraian Kegiatan  | 55      |
| 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagi Indikatif         | 56      |
| 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.  | 58      |



|       |   |    |
|-------|---|----|
| 4.5   | Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 melalui IKU Dinas Kesehatan | 59 |
| 4.6   | Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah melalui IKK   | 60 |
| BAB V | PENUTUP   | 61 |

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral sekaligus sebagai modal utama dari pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan Kesehatan dilakukan secara berjenjang mulai dari daerah sampai dengan pusat melalui pengelolaan kesehatan yang disebut dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). SKN mempunyai tujuan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Penyelenggaraan SKN memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan.

Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab telah memberikan kesempatan yang luas pada daerah untuk berprakarsa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga perkembangan pemerintahan dan laju pembangunan dapat ditingkatkan, termasuk didalamnya pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bondowoso.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah & Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan setiap lembaga/dinas untuk menyusun rencana strategis secara rinci sebagai acuan pembangunan dalam periode 5 tahun dan dapat berubah apabila ada kondisi tertentu sebagai syaratnya.

Oleh karena itu agar penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan kesehatan berjalan seiring dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan diawali dengan menganalisa kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso selama jangka waktu sebelumnya. Hasil analisa ditindaklanjuti dengan memepertimbangkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Jawa Timur, serta Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 telah disusun. Selanjutnya diharapkan semua komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat memanfaatkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan dan pedoman dalam merencanakan kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso.

## **1. 2. Dasar Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan berpedoman dan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

10. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun



2024 Nomor 4 Seri D);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 132);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 8).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 74)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai acuan dan

pedoman dalam merencanakan kegiatan pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Bondowoso. Hal ini dilakukan dengan harapan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh semua komponen Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dan semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan dapat sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati. Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 - 2029 yang masih bersifat indikatif diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah serta perkembangan kondisi masyarakat. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dinas Kesehatan yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2025 – 2029
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kesehatan Kabupaten Bondowoso baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan di bidang Kesehatan.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik dalam mencapai prioritas daerah di bidang Kesehatan.
6. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.
7. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  
- BAB II     GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**
  - 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
    - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan
    - 2.1.2 Sumber daya Dinas Kesehatan
    - 2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
    - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
  - 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan
    - 2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan
    - 2.2.2 Isu strategis Dinas Kesehatan
  
- BAB III    TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
  - 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2025 - 2029
  - 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029
  - 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
  - 3.4 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
  
- BAB IV    PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
  - 4.1 Uraian Program
  - 4.2 Uraian Kegiatan
  - 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu Indikatif
  - 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
  - 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 melalui IKU Dinas Kesehatan
  - 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah melalui IKK
  
- BAB V     PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso merupakan Perangkat Daerah dibawah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso, dimana dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas di Lapangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, maka kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Kesehatan serta tugas pembantuan.

Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

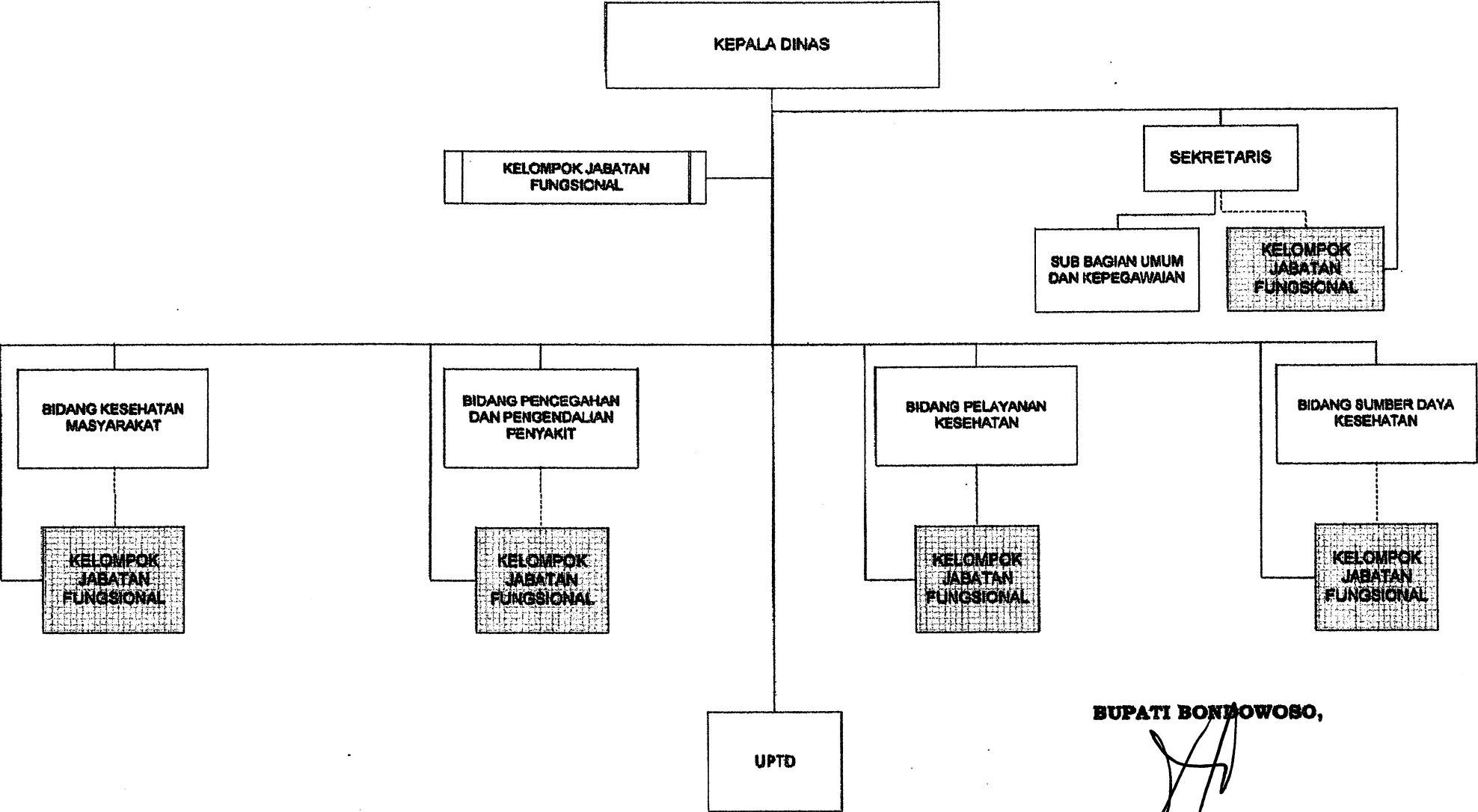
- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau/ unit kerja lain;
- g. Pelaporan kinerja Dinas;

- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi, pembinaan petunjuk teknis yang diperlukan instansi dan/atau unit kerja lain;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 139 Tahun 2021 seperti dalam bagan di bawah ini:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,

*[Signature]*  
SALWA ARIFIN

Dalam struktur organisasi, Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas dan Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pada dinas kesehatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Koordinator Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Koordinator Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :
  - a. Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
  - b. Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Sub Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
  - a. Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi;
  - b. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
  - a. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer;
  - b. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  - c. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi :
  - a. Sub Koordinator Kefarmasian;

- b. Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
  - c. Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 8. Puskesmas dan
- 9. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 10. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 11. Masing-masing Sub Koordinator dipimpin oleh seorang Kepala Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 12. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berikut ini penjabaran dari tugas dan fungsi masing-masing Bidang dan Bagian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021:

- 1. Bagian Sekretariat
  - a. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat mempunyai fungsi :
    - 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
    - 2) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
    - 3) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
    - 4) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset dan dokumen yang menjadi tanggung jawab Dinas;

- 5) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- 6) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Perencanaan , Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan,
- 2) Sub Koordinator Keuangan dan Pengelolaan Aset, dan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengelola kegiatan perencanaan umum dan perencanaan teknis bidang kesehatan.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- 5) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

- 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat,
- 2) Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- 3) Sub Koordinator Kesehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum, pengorganisasian dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,



penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;

- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penanggulangan bencana bidang kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Surveilans dan Imunisasi,
- 2) Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan
- 3) Sub Koordinator Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

#### 4. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum, pengorganisasian, dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - 5) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan jaminan kesehatan;
  - 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
  - 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
  - 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
- 1) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan primer,
  - 2) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan rujukan, dan
  - 3) Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- a. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana umum, pengorganisasian, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Sumber Daya Kesehatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
    - 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 5) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 6) Pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

- 1) Sub Koordinator Kefarmasian
- 2) Sub Koordinator Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga
- 3) Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Kesehatan

## 2.1. 2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

### 1. Personil

Data terakhir yang diperoleh di Kabupaten Bondowoso sebagai gambaran hasil pendataan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPTD (Puskesmas, GFK, Labkesda) adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Tenaga           | Jumlah |
|----|------------------------|--------|
| 1  | Pejabat Struktural     | 4      |
| 2  | Dokter                 | 67     |
| 3  | Dokter Gigi            | 38     |
| 4  | Perawat                | 595    |
| 5  | Bidan                  | 541    |
| 6  | Terapis Gigi dan Mulut | 6      |
| 7  | Teknis Elektromedis    | 1      |
| 8  | Nutrisionis            | 41     |
| 9  | Sanitarian             | 29     |
| 10 | Pranata Labkes         | 38     |

| No | Jenis Tenaga         | Jumlah       |
|----|----------------------|--------------|
| 11 | Asisten Apoteker     | 24           |
| 12 | Apoteker             | 22           |
| 13 | Penyuluh Kesmas      | 43           |
| 14 | Staf Admin Penunjang | 362          |
| 15 | Staf lainnya (juru)  | 38           |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>1.849</b> |

## 2. Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Sarana Kesehatan     | Jumlah |
|----|----------------------------|--------|
| 1  | Puskesmas                  |        |
|    | a. Puskesmas Perawatan     | 25     |
|    | b. Puskesmas Non Perawatan | 0      |
| 2  | Puskesmas Keliling         | 25     |
| 3  | Puskesmas Pembantu         | 63     |
| 4  | RSUD                       | 1      |
| 5  | RS Bhayangkara             | 1      |
| 6  | RS Swasta                  | 2      |
| 7  | Gudang Farmasi Kabupaten   | 1      |
| 8  | Apotik                     | 67     |
| 9  | Labkesda                   | 1      |

## 3. Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM)

| No | Jenis UKBM | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1  | Posyandu   | 1.104  |
| 2  | Ponkesdes  | 157    |

### 2.1. 3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso dapat digambarkan melalui beberapa indikator pelayanan sebagai berikut:

#### A. Indikator Kinerja Utama

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen

Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan. Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Di Kabupaten Bondowoso cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tahun ketahun mengalami kenaikan, tapi di bandingkan dengan Kabupaten sekitar Kabupaten Bondowoso masih terendah, Rendahnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Bondowoso dapat disebabkan karena banyak faktor yang melibatkan berbagai peran stakeholder, baik terkait kesehatan dan di luar urusan kesehatan atau lintas sektor, misalnya penyediaan sarana prasarana penunjang akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan, tingkat perekonomian masyarakat, dan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Jalan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan begitu terbatas. Masih terdapat wilayah di Bondowoso yang tidak memiliki akses jalan beraspal dan sulit untuk mencari angkutan umum. Kondisi ini pula mewakili faktor tempat tinggal masyarakat Bondowoso yang terpencar di berbagai pelosok wilayah Bondowoso.

Terkait tingkat perekonomian masyarakat, persentase penduduk masyarakat miskin di Bondowoso adalah sebesar 12,60 persen atau sekitar seratus ribu orang lebih. Angka tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin di Jawa Timur (sebesar 9,56 persen). Kemiskinan yang dirasakan oleh penduduk di Bondowoso menyebabkan mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Keterbatasan masyarakat miskin tidak hanya terhadap pembiayaan pelayanan tapi pada kondisi psikis masyarakat yang menyebabkan mereka untuk memutuskan tidak mencari pelayanan kesehatan.



Berdasarkan data dari Kantor BPJS Kabupaten Bondowoso cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ada penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, cakupan kepesertaan JKN telah meningkat sebesar 1,93 dan ada penurunan sebesar 1,3.

Tabel Capaian Kepesertaan JKN dan Kepesertaan Aktif JKN

| Indikator  | Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2025) |
|--|----------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|  | Tahun 2020           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |   |
| Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) | 85,8                 | 84,5       | 97,55      | 99,48      | 98,94      | 98,94   |
| Cakupan kepesertaan JKN yang aktif                   | 0                    | 0          | 72,19      | 76,45      | 76,55      | 76,55   |

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Bondowoso antara lain meningkatkan capaian target program bidang kesehatan dengan melanjutkan kegiatan inovasi yang sudah ada dan melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan jaringan antar stakeholder. Selain itu, perlu adanya upaya mendapatkan berbagai sumber dana guna optimalisasi kegiatan hingga mencapai ke masyarakat yang berada di pelosok wilayah Bondowoso. Dengan memperluas sasaran kegiatan diharapkan dapat mendorong meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal .

## **B. Indikator Kinerja Kunci**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan terdiri dari tiga puluh enam indikator. Realisasi dan capaian kinerja tiga puluh enam sasaran pada tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kunci (IKK)

| No | Indikator Kinerja Kunci  | Target |      |      |      |       | Realisasi |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | 2  | 3      | 4    | 5    | 6    | 7     | 8         | 9     | 10    | 11    | 12    | 13                           | 14   | 15   | 16   | 17   |
| 1  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 94,86 | 99,22 | 100   | 97,5  | 100%                         | 95%  | 99%  | 100% | 98%  |
| 2  | Cakupan penemuan kasus TB  | 80     | 80   | 90   | 90   | 90    | 52,4      | 60,4  | 78,2  | 94,5  | 74,4  | 66%                          | 76%  | 87%  | 105% | 83%  |
| 3  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 95,09     | 95,56 | 100   | 100   | 95,58 | 95%                          | 96%  | 100% | 100% | 96%  |
| 4  | Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan                | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                 | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 91,93     | 95,88 | 96,22 | 94,53 | 75,35 | 92%                          | 96%  | 96%  | 95%  | 75%  |
| 6  | Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat                               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0,009 | 0         | 0     | 0     | 0     | 0,009 | 0%                           | 0%   | 0%   | 0%   | 100% |
| 7  | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8  | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional | 0      | 0    | 0    | 100  | 100   | 0         | 0     | 0     | 40    | 100   | 0%                           | 0%   | 0%   | 40%  | 100% |
| 9  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar        | 0      | 0    | 100  | 100  | 100   | 0         | 0     | 65,3  | 68,72 | 68,2  | 0%                           | 0%   | 65%  | 69%  | 68%  |
| 10 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar                                    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0%                           | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 11 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 99,12     | 100   | 100   | 99,36 | 77,08 | 99%                          | 100% | 100% | 99%  | 77%  |
| 12 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                             | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 85,86     | 87,69 | 84,86 | 82,06 | 62,56 | 86%                          | 88%  | 85%  | 82%  | 63%  |
| 13 | Persentase Laporan Keuangan yang disusun   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 44,81     | 44,69 | 46,96 | 47,45 | 47,8  | 45%                          | 45%  | 47%  | 47%  | 48%  |

|    |   |     |     |     |     |     |       |       |       |      |     |      |      |      |      |      |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 15 | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 16 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,64 | 100   | 100   | 100  | 100 | 98%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,51 | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63,57 | 61,22 | 100   | 100  | 100 | 64%  | 61%  | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63,57 | 61,22 | 100   | 100  | 100 | 64%  | 61%  | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu  | 67  | 69  | 71  | 73  | 75  | 61    | 63    | 65    | 66   | 69  | 91%  | 91%  | 92%  | 90%  | 92%  |
| 21 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86,6  | 88,33 | 100   | 100  | 100 | 87%  | 88%  | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15,22 | 16,53 | 19,66 | 83,8 | 100 | 15%  | 17%  | 20%  | 84%  | 100% |
| 23 | Persentase penerbitan dan pemenuan komitmen SPP - IRT sesuai standar  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 24 | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar   | 80  | 80  | 82  | 82  | 85  | 80    | 80    | 82    | 85   | 85  | 100% | 100% | 100% | 104% | 100% |
| 25 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|    |   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 29 | Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                  | 0   | 0   | 100 | 100 | 100   | 0     | 0     | 72,19 | 76,45 | 76,55 | 0%   | 0%   | 72%  | 76%  | 77%  |
| 30 | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan  | 82  | 84  | 83  | 86  | 100   | 81,32 | 91,75 | 72,5  | 83,33 | 58    | 99%  | 109% | 87%  | 97%  | 58%  |
| 31 | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15    | 21,01 | 22,09 | 23,19 | 24,29 | 25,39 | 191% | 184% | 178% | 174% | 169% |
| 32 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 36,04 | 32,71 | 65,9  | 71,25 | 82,38 | 36%  | 33%  | 66%  | 71%  | 82%  |
| 33 | Presentase lanjut usia yang mandiri   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50    | 0     | 0     | 0     | 14,4  | 19,6  | 0%   | 0%   | 0%   | 29%  | 39%  |
| 34 | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 35 | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun   | 0   | 0   | 0   | 0   | 23,4  | 0     | 0     | 0     | 0     | 85    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 363% |
| 36 | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan  | 0   | 0   | 0   | 0   | 76,61 | 0     | 0     | 0     | 0     | 100   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 131% |

Ada beberapa indikator sasaran pada tahun 2024 yang baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) yang sebelumnya tidak masuk dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, ada beberapa indikator sasaran telah mencapai target indikator sasaran. Hal tersebut merupakan hasil kerja seluruh Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Ada beberapa indikator sasaran yang belum memenuhi target.

1) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Cakupan pelayanan kesehatan pada balita masih belum bisa mencapai target dikarenakan ada beberapa factor yang mempengaruhi yaitu adanya balita tidak datang keposyandu, Ponkesdes, dan Puskesmas di karenakan adanya daerah dengan Geografi sulit, Orang tua bekerja sehingga tidak ada yang mengantar, balita sekolah PAUD/TK di luar wilayah.

2) Cakupan penemuan kasus TB

Cakupan penemuan kasus tuberculosis (TB) ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

3) Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Presentase untuk anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan masih belum memenuhi target dikarenakan sasaran KMK lebih tinggi dari pada riil, dan banyak anak usia pendidikan dasar yang sekolah diluar wilayah tersebut, begitu pula dengan puskesmas yang melebihi target bahkan jauh lebih besar dari pada target karena banyak anak usai sekolah yang dari luar wilayahb sekolah di wilayah lain sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pada usia pendidikan dasar.

4) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar masih belum memenuhi target dikarenakan kenaikan sasaran,

Permasalahan di Kabupaten Bondowoso pada 2024 Tingginya komplikasi pada neonatus 1210 Bayi Baru Lahir dan adanya persalinan dengan SC 2691 ibu sehingga ada Bayi Baru Lahir tidak dilakukan IMD.

- 5) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

- 6) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

- 7) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar masih belum memenuhi standar dikarenakan adanya kenaikan sasaran sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/140/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 – 2025 ada kenaikan 2440 (19,95%).

- 8) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil.

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar masih belum mencapai target ini dikarenakan adanya kenaikan sasaran sesuai KMK penduduk sasaran terbaru, Ibu hamil Abortus sampai Desember 407 ibu hamil, Bayi Baru Lahir Prematur 382 bayi baru lahir, adanya budaya di kabupaten Bondowoso Ibu Hamil memeriksakan kehamilan ketika umur kehamilan lebih dari 3 bulan, adanya Geografi yang sulit sehingga ibu hamil tidak melakukan

ANC Terpadu 2 kali selama masa kehamilan. Puskesmas Sempol tidak memiliki Dokter umum untuk melakukan USG, sehingga pemeriksaan USG di Puskesmas Pujer.

- 9) Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan.

Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029..

- 10) Persentase merokok penduduk 10 – 21 tahun.

Persentase merokok penduduk 10 – 21 tahun ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

- 11) Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu.

Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu belum memenuhi target ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

- 12) Persentase penerbitandan pemenuhankomitmen SPP – IRT sesuai standar.

Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP – IRT sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

- 13) Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belum memenuhi target, kepesertaan aktif ini di peruntukan bagi masyarakat yang ikut BPJS/KIS yang masyarakat yang bayar iuran mandiri. Kesadaran Masyarakat masihy kurang tentang penting keaktifan mereka untuk bayar iuran tepat waktu, sementara ini Masyarakat bayar/mengaktifkan kalau mereka membutuhkan layanan kesehatan aja.



14) Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan.

Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan ini masih dibawah target dikarenakan masih ada sebagian pelaku usaha IRTP yang belum memenuhi komitmen sesuai peraturan yang berlaku.

15) Persentase warga negara usia 60 tahun keatas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar.

Persentase warga negara usia 60 tahun keatas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

16) Persentase lanjut usia yang mandiri

Persentase lanjut usia yang mandiri ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

17) Prevalensi depresi umur lebih dari 15 tahun.

Prevalensi depresi umur lebih dari 15 tahun ini belum memenuhi target dikarenakan indikator sasaran baru sesuai RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) dan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan 2025 – 2029.

### C. Standar Pelayanan Minimal

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengalami perubahan dengan adanya Permenkes Nomor 43 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan SPM Dinas Kesehatan sejak tahun 2017 menjadi lebih sedikit, yakni 12 indikator. Berikut merupakan capaian SPM pada tahun terakhir (2024):

| NO | NAMA INDIKATOR                   | HASIL/ REALISASI | TARGET/ SASARAN | CAPAIAN (%) | TARGET SPM Nasional |
|----|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 1  | Pelayanan kesehatan ibu hamil    | 62,56            | 100%            | 62,6        | 100%                |
| 2  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 77,08            | 100%            | 77,1        | 100%                |

| NO | NAMA INDIKATOR   | HASIL/ REALISASI | TARGET/ SASARAN | CAPAIAN (%) | TARGET SPM Nasional |
|----|--|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir                    | 75,35            | 100%            | 75,3        | 100%                |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                             | 97,52            | 100%            | 97,5        | 100%                |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar         | 95,58            | 100%            | 95,6        | 100%                |
| 6  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif                | 100              | 100%            | 100         | 100%                |
| 7  | Pelayanan kesehatan usia lanjut                        | 82,38            | 100%            | 82,3        | 100%                |
| 8  | Pelayanan tekanan darah tinggi di wilayah puskesmas    | 100              | 100%            | 100         | 100%                |
| 9  | Pelayanan Diabetes Melitus di wilayah puskesmas        | 100              | 100%            | 100         | 100%                |
| 10 | Pelayanan gangguan jiwa di wilayah Puskesmas           | 109,97           | 100%            | 110         | 100%                |
| 11 | Pelayanan orang dengan TB di wilayah Puskesmas         | 119,16           | 100%            | 119,2       | 100%                |
| 12 | Pelayanan orang dengan risiko HIV di wilayah Puskesmas | 116,91           | 100%            | 117         | 100%                |

Uraian diatas menunjukkan bahwa dari 12 indikator SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bondowoso ada 4 indikator yang masih belum mencapai target Nasional (100 %) dikarenakan beberapa permasalahan dan solusi sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil perlu ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kasus kematian ibu dan bayi. Kesadaran untuk memeriksakan kehamilan pada trimester I (3 bulan pertama kehamilan) masih kurang. Beberapa penyebab utama dari rendahnya kunjungan bumil K-4 adalah cakupan K-1 akses yang rendah, terjadinya abortus prematur, kemudian ada beberapa kasus KTD (kehamilan tidak dikehendaki) sehingga menyebabkan ibu mengambil keputusan untuk

tidak periksa. Mobilisasi Bumil masih tinggi, Kurangnya koordinasi antara BPM dan Bidan wilayah sehingga pencatatan bumil sering terlambat atau terlewat, Masih ada budaya menyembunyikan kehamilan, Masih ada kehamilan yang tidak di inginkan, Terdapat 395 kasus Abortus, Persalinan Prematur 333 kasus, untuk rencana tindak lanjut dalam kegiatan ini ibu camat melalui lembaga PKK untuk meningkatkan kunjungan antenatal empat kali (K4).

- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya persalinan yang dilaksanakan di Pustu, Ponkesdes dan rumah pasien sedangkan dalam SPM persalinan harus dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan yaitu Puskesmas atau Bidan Praktek Mandiri.
- 3) Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir masih belum mencapai target 100 % Rendahnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain syarat Syarat layanan KN Lengkap tidak terpenuhi, terutama IMD, karena masih tingginya kejadian komplikasi neonatal pada bayi, sebanyak 8802 kasus, Tidak semua bayi yang lahir di RS di IMD, Masih ada kematian Neonatus.
- 4) Capaian pelayanan kesehatan balita yang rendah kurang dari 100% dari target, ini berhubungan dengan adanya Balita tidak datang keposyandu, Ponkesdes, dan Puskesmas di karenakan adanya daerah dengan Geografi sulit, Orang tua bekerja sehingga tidak ada yang mengantar, Balita sekolah PAUD/TK di luar wilayah.
- 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar masih rendah kurang dari 100%. Hal ini disebabkan sasaran KMK lebih tinggi dari pada riil, dan banyak anak usia pendidikan dasar yang sekolah diluar wilayah tersebut, begitu pula dengan puskesmas yang melebihi target bahkan jauh lebih besar dari pada target karena banyak anak usai sekolah yang dari luar wilayahb sekolah di wilayah lain sehingga dapat mempengaruhi kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- 6) Pelayanan kesehatan usia lanjut masih belum mencapai target 100% dikarenakan tidak adanya alat laboratorium sederhana untuk menunjang kegiatan pelayanan skrening kesehatan pada usia lanjut, kegiatan skrening kesehatan pada lanjut usia.

Kajian Sustainable Development Goals (SDGs) Indikator Kajian Sustainable Development Goals (SDGs) yang terkait dengan Dinas Kesehatan terdiri dari 23 indikator. Banyak dari indikator KLHS yang mirip dengan indikator-indikator sebelumnya. Meski begitu, masih terdapat indikator dalam KLHS yang tidak masuk ke dalam target renstra. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian target dengan berdasarkan pada kondisi yang ada atau target yang serupa. Namun, masih terdapat banyak dari indikator yang tidak memiliki target. Secara umum indikator KLHS mengalami perkembangan yang fluktuatif. Indikator KLHS yang masih tidak mencapai target adalah persentase penduduk miskin yang tercakup dalam Program JKN. Secara umum, Dinas Kesehatan selalu berupaya untuk melakukan integrasi antara Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan JKN dengan BPJS. Selain itu, demi mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) Dinas Kesehatan juga melakukan *update*/ perbaharuan data masyarakat miskin. Namun, dengan adanya fluktuasi pada data PBI JKN dan data masyarakat miskin, maka capaian juga turut mempengaruhi. Meski begitu pada tahun 2023 capaian persentase penduduk miskin yang tercakup dalam JKN sudah mencapai lebih dari 100%.

#### **D. Perkembangan Tingkat Capaian Kinerja Program**

Program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan pada tahun terakhir (2024) terdiri dari 5 Program. Secara garis besar, beberapa indikator program telah dapat dicapai, namun masih ada beberapa capaian program yang belum tercapai, berikut merupakan rincian beberapa capaian program Dinas Kesehatan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut :

Berdasarkan penyampaian diatas dapat diketahui bahwa beberapa indikator program telah dapat dicapai, namun masih ada beberapa capaian program yang belum tercapai, berikut merupakan latar belakang kondisi yang dapat berpengaruh pada ketidaktercapaian program :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil dan persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir masih perlu ditingkatkan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kasus kematian ibu dan bayi. Rendahnya pelayanan kesehatan ibu hamil disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain mobilisasi Bumil masih tinggi, kurangnya koordinasi antara Bidan Praktek Mandiri dan Bidan wilayah sehingga pencatatan bumil sering terlambat atau terlewat, masih ada budaya menyembunyikan kehamilan, kunjungan rumah bidan pemegang wilayah masih kurang.

Rendahnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain syarat layanan yang tidak terpenuhi, terutama IMD. Selain itu, masih tingginya kejadian komplikasi neonatal pada bayi, sebanyak 8802 kasus, serta tidak semua bayi yang lahir di RS di IMD. Rendahnya pelayanan kesehatan balita disebabkan oleh berbagai macam penyebab, antara lain definisi operasional SPM yang baru masih belum dipahami, pencatatan dan pelaporan belum maksimal, balita tidak datang ke posyandu (kurang dari 8 x penimbangan dalam 1 tahun), medan sulit, ada bayi yang tidak di imunisaasi lanjutan(menolak imunisasi), mobilitas balita tinggi (terutama daerah perkotaan).

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar juga masih belum mampu mencapai target dikarenakan adanya perubahan definisi operasional pada Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini menyebabkan jumlah sasaran yang menjadi semakin besar karena semua siswa setingkat SD dan SMP harus mendapatkan pelayanan.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Rendahnya capaian dari pelayanan kesehatan penderita tekanan darah tinggi/ hipertensi; pelayanan kesehatan penderita hipertensi berhubungan dengan kunjungan pasien/penderita ke puskesmas juga masih rendah. Sedangkan ketidak tercapaian indikator terkait penyakit menular disebabkan oleh berbagai macam kondisi. Sedangkan, rendahnya cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV disebabkan oleh kunjungan rumah pada kasus positif sempat terhenti sehingga memutus informasi untuk melakukan konseling pada kelompok kunci.

3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Cakupan kunjungan rawat jalan dan kunjungan rumah tidak mencapai target dikarenakan kurang kesadaran masyarakat untuk kegiatan skrining kesehatan bila tidak ada keluhan.

4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tidak tercapainya persentase sarana kefarmasian sesuai standar disebabkan oleh masih Adanya indikator penilaian sarana kefarmasian yang tidak tercapai baik dari segi sarana maupun prasarana ataupun dari segi pelayanan kefarmasian. Persentase fasilitas IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) sesuai standar belum tercapai dikarenakan tidak ada pengajuan berkas, berkas tidak lengkap atau IRTP tidak memenuhi syarat baik dari segi hygiene sanitasi atau indikator lainnya.

5. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Indikator terkait kompetensi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui kewajiban kepemilikan STR (Surat Tanda Registrasi) bagi tenaga kesehatan. Ada beberapa tenaga kesehatan yang belum memenuhi SKP untuk Registrasi STR Aplikasi Online di KTKI sering mengalami gangguan dan ada peraturan yang berubah mengikuti Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

Selain ada beberapa indikator program yang masih belum mencapai target pada tahun 2024, ada pula indikator program yang telah mampu

mencapai target, bahkan melebihi target. Adapun indikator program yang telah mencapai dan melebihi target pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan peserta KB aktif melebihi target karena masyarakat telah memiliki kesadaran bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitas. Pelayanan kesehatan ibu bersalin telah mencapai target karena sudah optimalnya kinerja tenaga kesehatan serta peran serta stakeholder yang semakin nyata. Peran optimal dari masyarakat bahwa ibu hamil dan bayi memerlukan perhatian lebih dari lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Persentase balita stunting (pendek dan sangat pendek), persentase posyandu mandiri, rumah tangga sehat, persentase akses jamban dan akses air bersih, serta pembentukan dan pembinaan Pos UKK Binaan di wilayah kerja Puskesmas telah mencapai target karena sudah optimalnya kinerja tenaga kesehatan serta peran serta stakeholder yang semakin nyata.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

SKD KLB (Sistem Kewaspadaan Dini) Kejadian Luar Biasa dan persentase desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) telah mencapai target karena setiap kejadian luar biasa yang terjadi akan selalu mendapat penanganan utama agar cepat teratasi, begitu pula dengan imunisasi. Persentase penyelenggaraan pemeriksaan jamaah haji telah mencapai target dikarenakan semua jamaah haji wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan agar selama pelaksanaan ibadah haji kesehatan para jamaah terjamin. Persentase imunisasi dasar lengkap bayi melebihi target karena jumlah bayi yang ada lebih banyak dari sasaran dari pusdatin. Pelayanan kesehatan pada usia produktif mampu mencapai target, bahkan melebihi target. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan definisi operasional sesuai dengan Permenkes 04 Tahun 2019, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan lebih sederhana daripada pelayanan kesehatan pada tahun sebelumnya. Pelayanan Diabetes Melitus di wilayah puskesmas dapat melebihi target karena adanya penurunan target di tahun 2019. Penghitungan target didasarkan pada estimasi

prevalensi Diabetes Melitus Kabupaten Bondowoso (sebesar 2% dari penduduk usia  $\geq 15$  tahun). Estimasi prevalensi tersebut berdasarkan Riskesdas 2018. Penderita Kusta yang selesai berobat (RFT Rate) telah melebihi target karena adanya kedisiplinan yang baik dari para penderita serta dukungan moril dari keluarga. Cakupan Incidence Rate DBD telah mencapai target, karena insiden DBD berhasil ditekan dengan fogging dan pembasmian jentik nyamuk melalui kader PSN.

### 3. Program Upaya Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan tradisional telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Persentase penduduk miskin yang tercakup dalam JKN, persentase rumah sakit dan klinik utama yang memiliki ijin, persentase rumah sakit rujukan yang berfungsi sesuai standar, persentase laboratorium klinik yang memiliki ijin, dan persentase rumah sakit terakreditasi telah mencapai target. Persentase Puskesmas yang melaksanakan asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresure, serta persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional dapat mencapai target karena semakin banyaknya kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan untuk petugas puskesmas tentang kesehatan tradisional.

### 4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, dan persentase fasilitas IRT (Industri Rumah Tangga Pangan) sesuai standar telah tercapai melebihi target yang ditetapkan. Cakupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dapat melebihi target karena petugas medis telah mampu menganalisis kebutuhan obatnya.

### 5. Program Pemberdayaan SDM Kesehatan

Persentase puskesmas yang memiliki tenaga strategis telah tercapai. Hal ini didukung dengan adanya alokasi tenaga kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Program Nusantara Sehat. Selain itu, ketersediaan tenaga kesehatan strategis di puskesmas



dapat terpenuhi melalui adanya tenaga kesehatan dari pengadaan CPNS dan P3K Tahun 2024.

6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tercapainya persentase sarana kesehatan (kendaraan roda 4) sesuai standar disebabkan oleh adanya Pengadaaan sarana kesehatan (kendaraan roda 4) selalu diupayakan setiap tahunnya melalui berbagai sumber dana yang ada. Persentase ketersediaan alat kesehatan di puskesmas sudah melebihi target dikarenakan seluruh petugas penanggung jawab alat kesehatan di puskesmas telah memasukkan data alat kesehatan, baik yang dalam kondisi baik maupun tidak. Akibat kondisi tersebut, maka data alat kesehatan dapat melebihi dari target jumlah standarnya, yakni alat kesehatan baik yang berfungsi baik atau tidak berfungsi. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial, dan cakupan ketersediaan obat dan vaksin esensial dapat melebihi target karena petugas medis telah mampu menganalisis kebutuhan obatnya.

7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Indikator persentase sarana kesehatan yang memanfaatkan dana cukai telah memenuhi target. Adanya pendanaan kesehatan bersumber cukai yang nominalnya cukup besar, mampu dimanfaatkan untuk 15 sarana kesehatan melalui perbaikan puskesmas, puskesmas pembantu, dan pengadaan ambulan.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020 hingga tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso telah mendapatkan, kenaikan anggaran dari tahun ke tahun dengan memperhatikan rasio antara realisasi dan anggaran yang baik sesuai progress pelaksanaan program.

**2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan**

Kelompok sasaran layanan pada dinas kesehatan yaitu langsung kepada Masyarakat.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan**

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan**

Permasalahan yang timbul dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah :

#### **1. Rendahnya Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)**

Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Bondowoso dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Rendahnya cakupan kepesertaan JKN dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik faktor bidang kesehatan dan non-kesehatan. Multi faktor dari cakupan kepesertaan JKN menyebabkan upaya untuk peningkatannya membutuhkan campur tangan non kesehatan. Faktor ekonomi, budaya, dan sarana prasarana terkait akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh besar.

#### **2. Tingginya Angka Kematian Ibu**

Angka kematian ibu adalah salah satu indikator dari derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Bondowoso dari tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2024 Angka kematian ibu (AKI) Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan kembali. Kondisi ini disebabkan oleh antara lain kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Upaya pelayanan kesehatan ibu hamil harus tetap menjadi prioritas masalah yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.

#### **3. Tingginya Angka Kematian Bayi**

Angka kematian Bayi di Kabupaten Bondowoso dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan namun pada

tahun 2024 kembali mengalami kenaikan sehingga upaya pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan balita harus tetap menjadi prioritas masalah yang harus ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Sebenarnya banyak faktor yang berperan dalam angka kematian bayi baru lahir seperti bayi lahir prematur, pernikahan usia dini, jumlah kehamilan yang terlalu banyak, dan lainnya. Kemudian ternyata ada faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu faktor budaya. Permasalahan kematian ibu dan bayi memiliki penyebab yang kompleks, sehingga upaya penurunannya memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor seperti profesional di bidang kesehatan, pemerintah, dan masyarakat.

#### **4. Tingginya angkanya Stunting**

Usia Harapan Hidup (UHH) yang rendah juga dipengaruhi oleh cakupan kepesertaan JKN di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk status gizi masyarakat yang menjadi perhatian penting adalah status gizi pada Ibu Hamil dan Balita. *Stunting* adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Stunting terjadi karena kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh tidak tepat, yang mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang maksimal, mudah sakit dan berdaya saing rendah, sehingga bisa terjebak dalam kemiskinan.

#### **5. Penerapan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)**

Sejak dilaksanakannya SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) maka seluruh masyarakat di Indonesia diharapkan mendapat perlindungan kesehatan berupa JKN. Kabupaten Bondowoso sudah mampu memberikan kontribusi terbaik terkait integrasi Jamkesda. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya akses masyarakat terutama masyarakat miskin terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Meski begitu, capaian ini perlu dipertahankan melalui upaya berkesinambungan yakni penanggulangan masyarakat miskin yang tidak

tercakup JKN di Kabupaten Bondowoso agar Universal Health Coverage (UHC) benar-benar dapat tercapai.

#### **6. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung Pola Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)**

Kondisi masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk disuatu daerah, karena selain kondisi lingkungan yang buruk perilaku merupakan faktor yang mempunyai kontribusi besar terhadap derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten Bondowoso yang masih sering terjadi seperti masih cukup tingginya kasus penyakit menular seperti antara HIV/AIDS, Demam berdarah Dengue, Malaria lintas batas, Leptospirosis, TBC maupun penyakit tidak menular seperti antara lain Diabetes melitus, Stroke, Jantung.

#### **7. Rendahnya sarana prasarana puskesmas dan jaringannya**

Adanya sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya yang memadai merupakan salah satu indikator yang menunjang keberhasilan program dalam bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dibandingkan penduduk diharapkan 10: 100.000 penduduk. Kondisi sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 3,37 : 100.000 penduduk yang artinya adalah setiap 1 (satu) Puskesmas melayani penduduk 31.029 penduduk. Puskesmas Pembantu mempunyai rasio 8,51: 100.000 penduduk. Fakta ini menyulitkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dan membutuhkan layanan segera dalam menjangkau pelayanan kesehatan tersebut. Keterbatasan sarana prasarana disebabkan oleh terbatasnya anggaran dan hambatan manajemen untuk pembangunan, serta kondisi geografis yang menyulitkan akses fisik pelayanan kesehatan.

#### **8. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan dan permukiman**

Faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat adalah kondisi lingkungan yang tercermin antara lain dari indikator kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar. Kondisi

kesehatan lingkungan di Kabupaten Bondowoso masih belum menggembirakan. Perwujudan kesehatan individu dan masyarakat tidak terlepas dari sanitasi lingkungan yang baik. Sedangkan Kabupaten Bondowoso masih menghadapi tantangan besar terkait sanitasi lingkungan. Tantangan yang dihadapi Kabupaten Bondowoso terkait pembangunan kesehatan, khususnya bidang sanitasi masih sangat besar. Yang dimaksud akses sanitasi (jamban) adalah banyaknya masyarakat yang tidak buang air besar di sembarang tempat. Penduduk yang memanfaatkan jamban sehat sebesar 75,59 %. Perilaku masyarakat yang sudah tidak buang air besar di sembarang tempat dinamakan ODF (Open Defecation Free / Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan). Padahal pada tahun 2019, seluruh wilayah di Indonesia ditargetkan untuk 100% akses sanitasi jamban (*universal acces*)

#### **9. Rendahnya status kesehatan masyarakat (Gizi )**

Kondisi gizi masyarakat khususnya pada balita mempunyai kecenderungan semakin membaik. Status gizi masyarakat mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan status kesehatan masyarakat. Balita Gizi Buruk pada Tahun 2013 sebesar 1,85% menurun pada tahun 2019 menjadi 1,33%. Walaupun demikian masalah gizi tetap menjadi ancaman dan menjadi perhatian karena Kabupaten Bondowoso menurut hasil SSGI 2024 persentase stunting mencapai 11,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi anak harus diperhatikan mulai dalam kandungan sampai berumur dua tahun yang biasa disebut sebagai 1000 Hari Pertama Kehidupan.

#### **10. Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Masalah utama yang harus segera ditangani adalah masih tingginya penyakit infeksi/ menular di masyarakat walaupun kecenderungannya semakin menurun/ membaik dibandingkan dengan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, stroke dan penyakit jantung yang cenderung meningkat, sehingga tetap masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Penyakit infeksi/menular seperti penyakit tuberkulosis paru (TBC), Malaria, ISPA, Pneumonia, Kusta, Lepstopirosis, Diare, dan penyakit menular lainnya masih manjadi

masalah serius yang harus ditangani dan dikendalikan secara komprehensif dengan keterlibatan berbagai program dan sektor. Pengendalian faktor resiko terjadinya penyakit haruslah ditangani secara tepat. Penguatan surveillance penyakit untuk deteksi dini timbulnya suatu penyakit dalam rangka untuk pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat. Sistem informasi yang tepat dengan semua pemegang kepentingan menjamin penanganan dini, cepat, dan tepat.

Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) seperti Polio, Campak, TBC, Diphteri, Tetanus dan Pertusis, capaiannya secara kuantitas menunjukkan telah diatas 80%, namun secara kualitas masih perlu diperbaiki. Pengelolaan *cold chain* menjamin ketersediaan kualitas vaksin dan kesinambungan logistik yang dapat dipertanggung jawabkan. *Safe injection* menjamin terhindarnya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), keamanan bagi provider dan masyarakat secara luas, lebih khusus terbentuknya imunitas bagi sasaran imunisasi.

#### **11. Kurangnya Rumah Sakit yang dimiliki Pemerintah Daerah.**

Wilayah Kabupaten Bondowoso hanya memiliki satu rumah sakit milik pemerintah daerah (RSD) itupun letaknya diwilayah kota, sedang masyarakat Bondowoso sebagian besar hidup dipelosok/dipedesaan yang jauh dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Dengan kondisi saat ini berbagai keluhan kesehatan masyarakat yang sangat kompleks dan sangat perlunya penanganan kesehatan lanjutan yang cepat, tepat dan berkopenten.

#### **2. 2. 2. Isu Strategis Dinas Kesehatan**

Berdasarkan analisis dari isu strategis di tingkat global, nasional dan regional serta dengan mempertimbangkan telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bondowoso, dan Renstra Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pada saat ini sampai pada lima tahun mendatang. Berdasarkan dari analisis tersebut

maka Dinas Kesehatan dapat menggunakan teknik menyimpulkan isu strategis daerah dapat dilihat di Tabel 2.1

Tabel 2.1 Teknisk Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                      | PERMASALAHAN PD   | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                       | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG REVELAN DENGAN PD        |  |   | ISU STRATEGIS PD  |
|--|---|---|--|--|---|---|
|  |   |   | GLOBAL   | NASIONAL   | REGIONAL  |   |
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   |
| Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masalah kesehatan | Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan                       | Infrastruktur belum memadai                           | Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin maju   | Kebijakan penggunaan produksi dalam negeri bagi sarana dan prasarana kesehatan | Tingginya kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terakomodir           | Pemenuhan sarana dan prasarana menggunakan sumber daya yang tersedia dan penyediaan Rumah Sakit Daerah di wilayah perbatasan. |
|  | Ketersediaan SDM pelayanan kesehatan yang terbatas                          | Rendahnya kualitas SDM                                | Tuntutan SDM pelayanan kesehatan yang semakin tinggi | Tersedianya portal untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan kesehatan    | Pelatihan dan pendidikan bagi petugas pelayanan kesehatan secara bertahap | Peningkatan kualitas SDM pelayanan kesehatan secara berkala   |
|  | Tingginya beban biaya pelayanan kuratif masyarakat dengan masalah kesehatan | Masih adanya masyarakat miskin                        | Amanat SDG untuk kesehatan untuk semua               | Kebijakan Program UHC (Universal Health Coverage) yang merata                  | Pemerintah daerah telah membuat kebijakan yang mendukung UHC              | Pemanfaatan Jaminan Kesehatan bagi seluruh masyarakat   |
| Pencegahan dan penanggulangan penyakit                         | Tingginya angka kesakitan penyakit menular                                  | Tingginya potensi bencana KLB (Kejadian Luar Biasa)   | Perubahan iklim yang tidak terdeteksi                | Potensi penularan penyakit tertentu semakin meluas                             | Potensi kesiapsiagaan penanggulangan KLB masih rendah                     | Pemanfaatan aplikasi pemantauan potensi KLB   |
|  | Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular                            | Tingginya prevalensi penderita penyakit tidak menular | Perubahan gaya hidup yang berisiko                   | Kebijakan yang mendukung gaya hidup sehat masih terbatas                       | Pemantauan pada produk yang dikonsumsi perlu ditingkatkan                 | Peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko penyakit tidak menular   |
| Promosi perilaku hidup bersih dan sehat                        | Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap PHBS                             | Pergeseran nilai-nilai sosial masyarakat              | Pengaruh informasi yang tidak valid                  | Kebijakan yang mendukung PHBS telah banyak                                     | Dukungan lintas sektor semakin tinggi                                     | Peningkatan promosi PHBS kepada masyarakat  |
|  | Kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan masyarakat                | Pencemaran dan kerusakan lingkungan                   | Perubahan iklim yang tidak terdeteksi                | Terbatasnya kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan                    | Terbatasnya kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan               | Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan  |



Isu strategis merupakan faktor-faktor penting yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan karena memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan dan rencana jangka menengah rumah sakit. Berdasarkan hasil analisis terhadap tantangan eksternal, perubahan kebijakan nasional, serta dinamika internal organisasi yang menuntut penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pengembangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mengidentifikasi beberapa isu strategis utama yang akan menjadi fokus penanganan selama periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

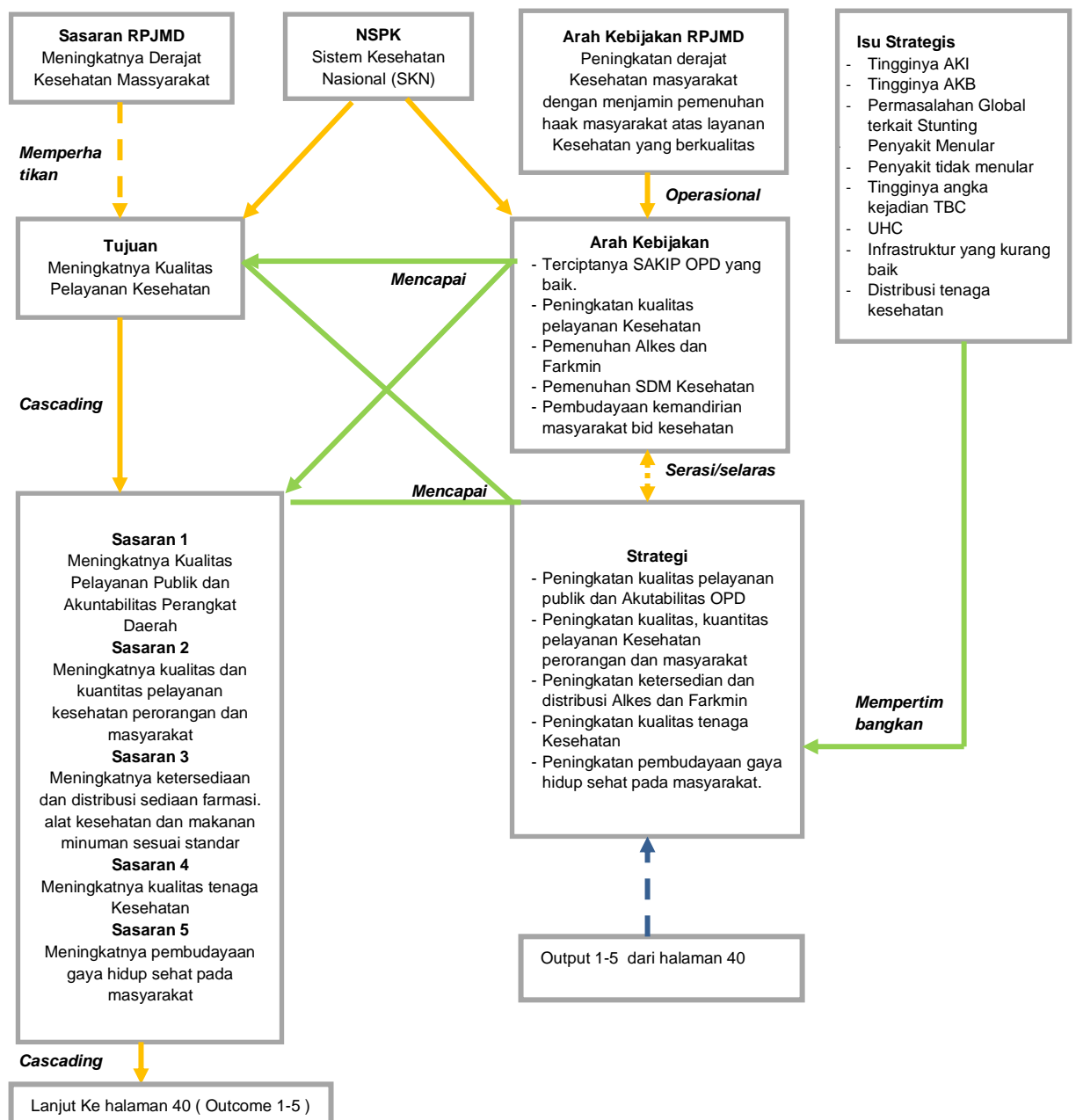
1. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masalah kesehatan
  - a. Infrastruktur belum memadai
  - b. Rendahnya kualitas SDM
  - c. Masih adanya masyarakat miskin
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
  - a. Tingginya angka kesakitan penyakit menular
  - b. Tingginya angka kesakitan penyakit tidak menular
3. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat
  - a. Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap PHBS
  - b. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan masyarakat

### BAB III

#### TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025 - 2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolak ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Kesehatan



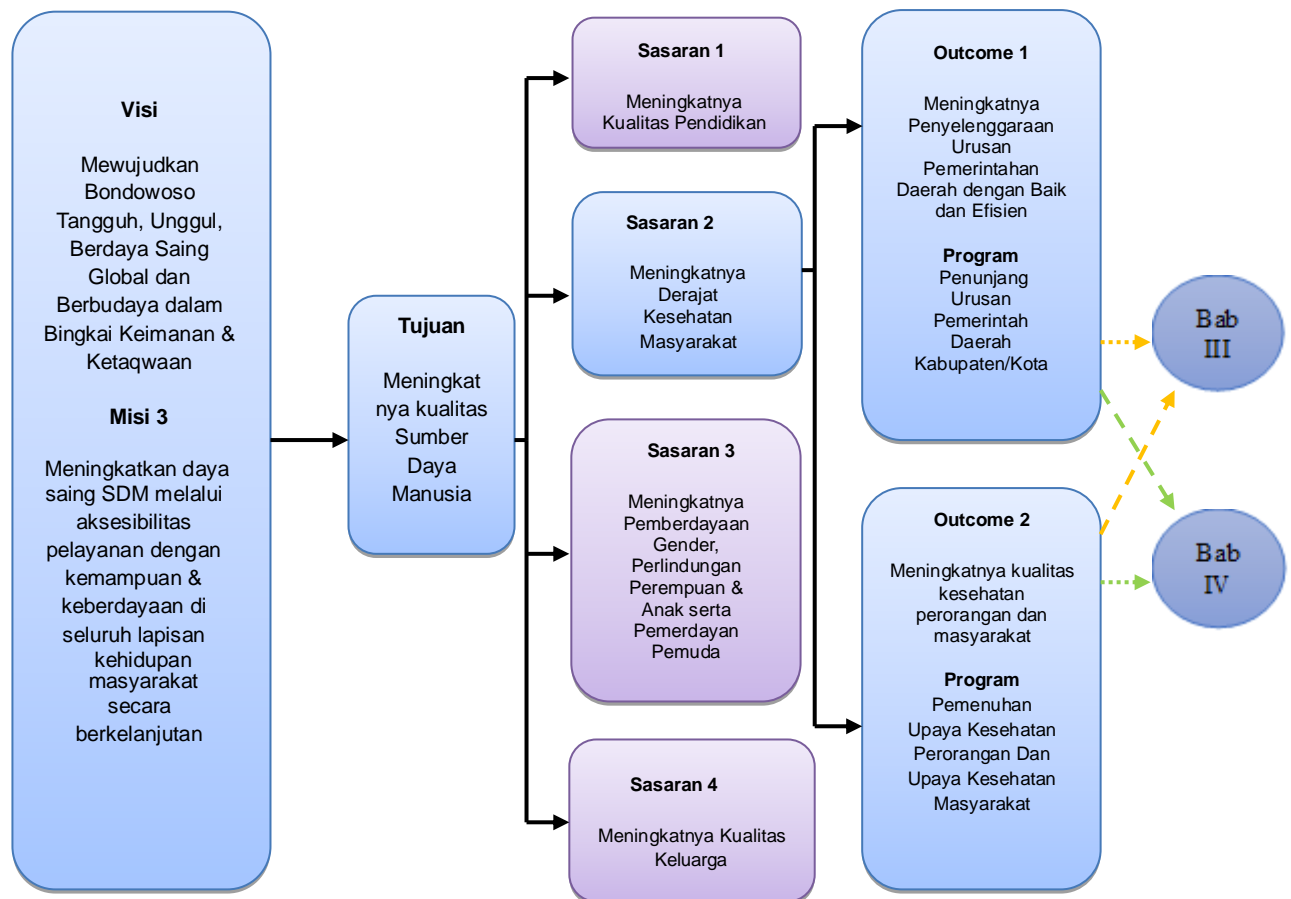


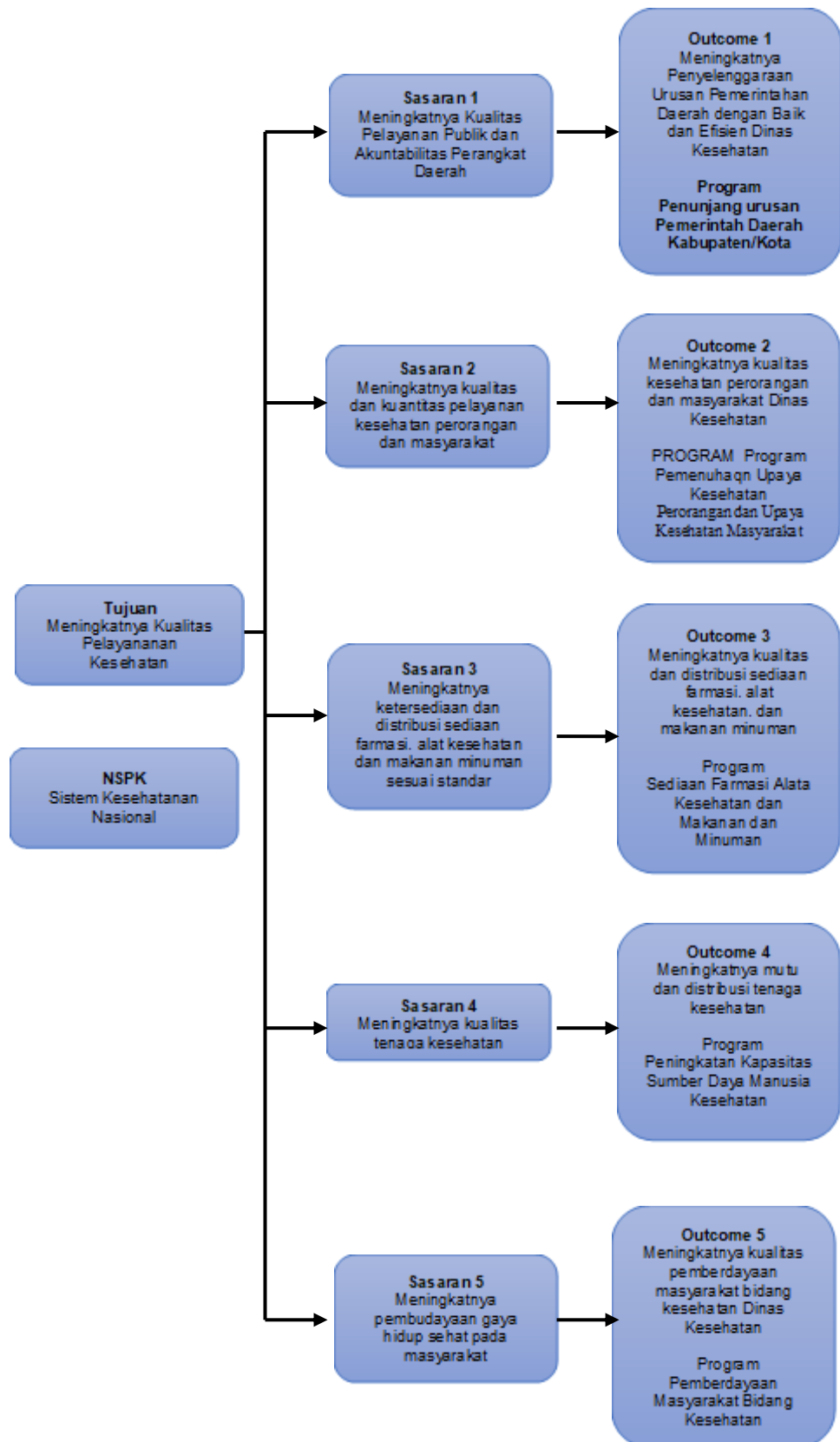
- Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

#### Output 5

- Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
- Terlaksananya kegiatan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas Kesehatan.





### **3.1. Tujuan Renstra Dinas Kesehatan 2025 - 2029**

Sebagai membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan. akan berperan dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Bondowoso “Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketaqwaan”, khususnya pada Misi ke-3 yaitu “Meningkatnya daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan kemampuan dan keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan”. Tujuan 3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; serta Sasaran 3.1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Bondowoso tersebut maka Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso merumuskan tujuan dalam Renstra 2025 – 2029 adalah

#### **“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan”**

Tujuan ini mencerminkan Tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga menjalankan fungsi administrasi dinas, serta fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

### **3.2. Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029**

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso yaitu "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat", Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menetapkan lima sasaran utama dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yaitu: Tujuan tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.
3. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar.
4. Meningkatnya kualitas tenaga Kesehatan.
5. Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat.

Teknik merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat Tabel berikut ini:

### **3.3. Strategi Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029**

Strategi Dinas Kesehatan untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan melalui Rencana Strategis (Renstra), yang menjabarkan upaya pembangunan kesehatan ke dalam program dan kegiatan, meliputi pengembangan kebijakan publik berwawasan sehat, penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penguatan akses dan mutu pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat di tabel sebagai berikut:



### 3.4. Arah Kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 - 2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian integral dari proses Perencanaan strategis yang bersifat komprehensif dan sistematis. Strategi menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran organisasi akan dicapai secara efektif dan efisien, sedangkan arah kebijakan merinci langkah-langkah operasional sebagai penjabaran dari strategi tersebut. Kelimanya disusun untuk menjamin konsistensi antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan tindakan nyata dilapangan. Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029, telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan mutu layanan kesehatan, dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan tersebut disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

| Visi                                      | Mewujudkan Bondowoso Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Global dan Berbudaya dalam Bingkai Keimanan dan Ketaqwaan   |  |  |
|---|---|--|--|
| Misi                                      | Meningkatkan daya saing SDM melalui aksesibilitas pelayanan dengan Kemampuan dan Keberdayaan di seluruh lapisan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan |  |  |
| Tujuan                                    | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah   | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah | Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. |
|   | Meningkatnya kualitas dan   | Peningkatan kualitas dan   | Peningkatan pelayanan  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat   | kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat  | Kesehatan masyarakat, peningkatan status gizi keluarga, kualitas kesehatan lingkungan, penyelenggaraan upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan Pembangunan Rumah Sakit Perbatasan. |
|  | Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | Peningkatan ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar | Pemenuhan dan pemerataan ketersediaan farmasi, alat Kesehatan, makanan minuman sesuai standar.  |
|  | Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan  | Peningkatan kualitas tenaga kesehatan  | Peningkatan pemenuhan, kualitas dan pemerataan sumber daya Kesehatan.   |
|  | Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat   | Peningkatan pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat   | Peningkatan pembudayaan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.  |

Berikut merupakan teknik merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah bisa dilihat tabel sebagai berikut:

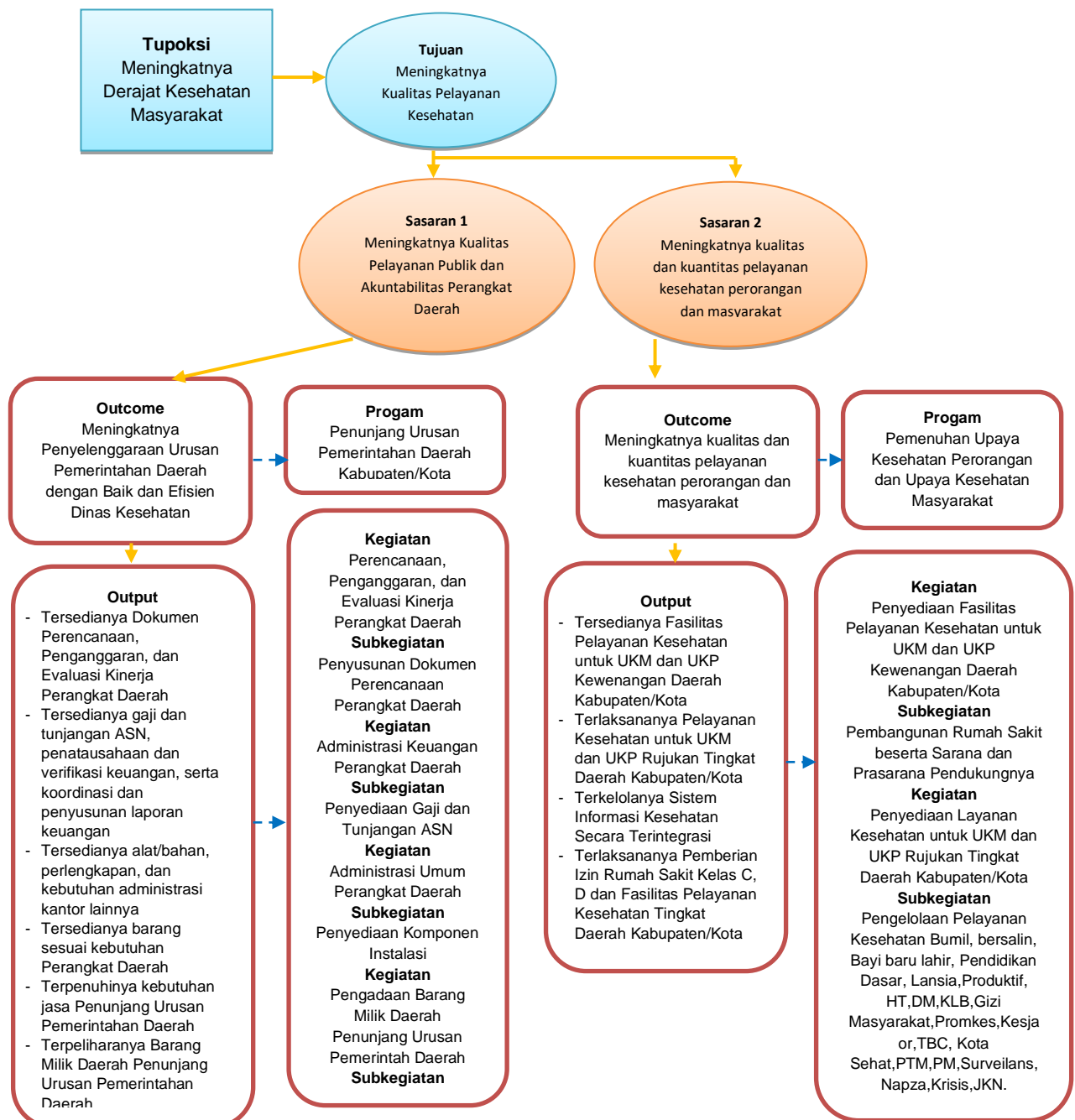
## BAB IV

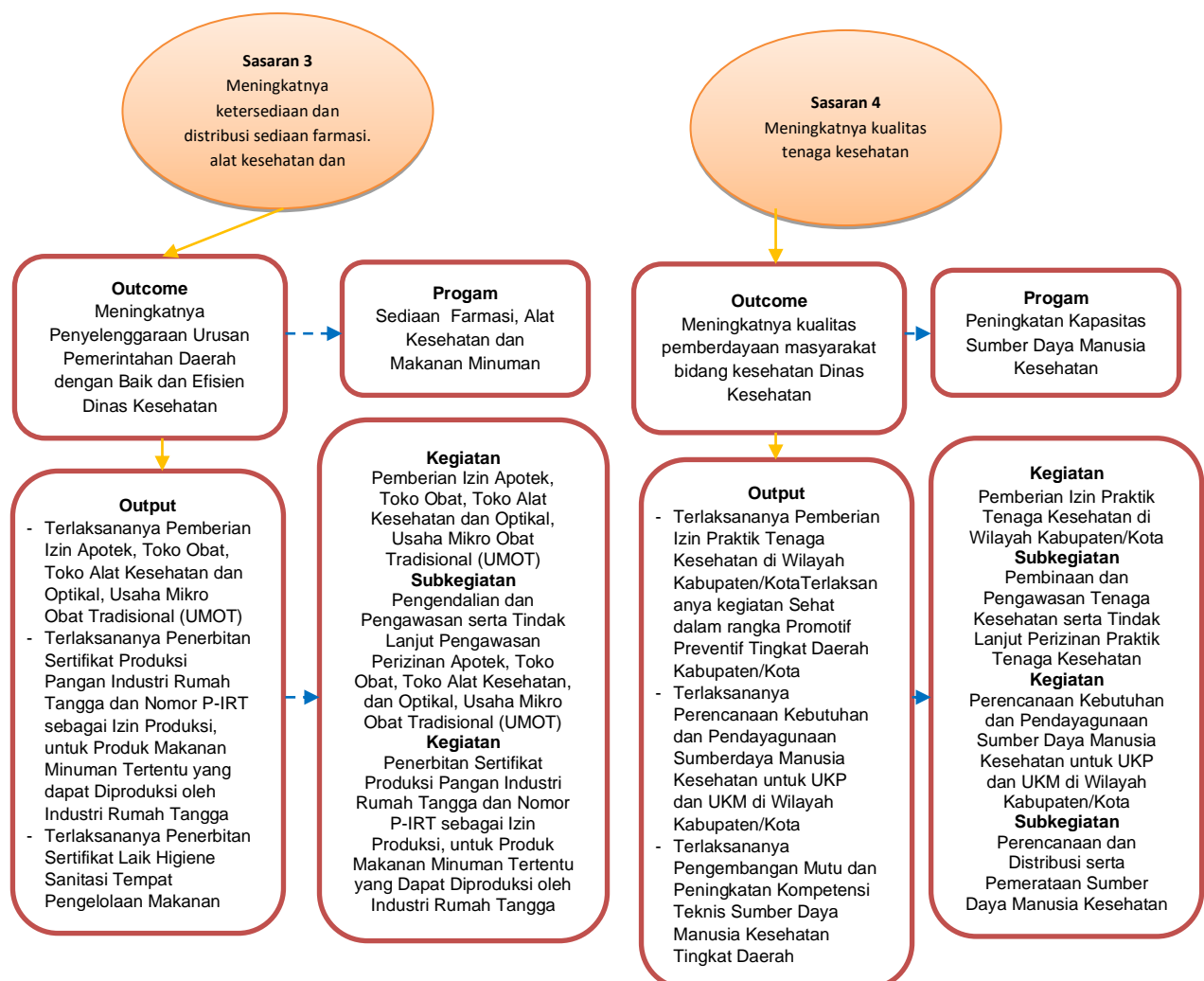
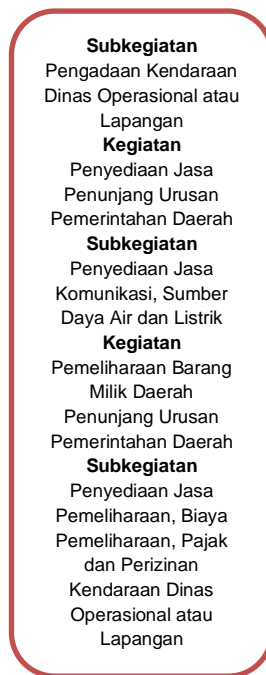
### PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

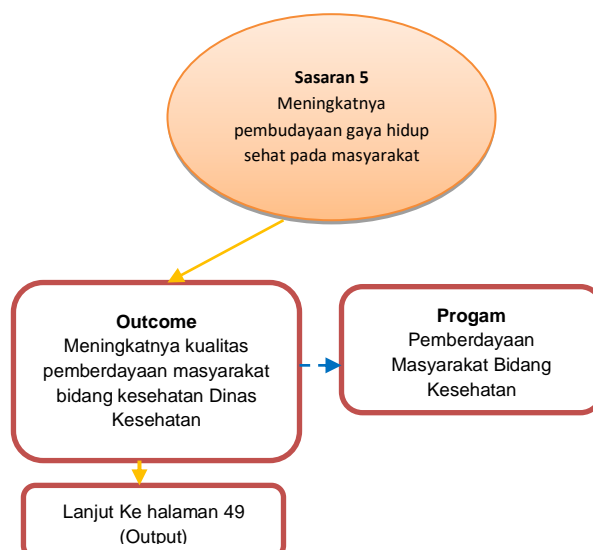
#### 4.1. Uraian Program

Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menetapkan beberapa program. Program kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan guna merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra









Berikut merupakan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso tahun 2025 - 2029:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi
  - d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
  - b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
  - c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
  - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
  - c. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - b. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
  - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menetapkan beberapa program. Program kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan

guna merealisasikan target yang telah ditetapkan. Berikut program perangkat daerah bisa di lihat di Tabel 4.1



**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME  | INDIKATOR<br>OUTCOME   | BASELIN<br>E 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |            |                 |            |                 |            |                 |   |                 | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|---|--|-------------------|------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|-----------------|---|
|   |  |                   |      | 2026                            |                 | 2027       |                 | 2028       |                 | 2029       |                 | 2030  |                 |   |
|   |  |                   |      | TARGE<br>T                      | PAGU            | TARGE<br>T | PAGU            | TARGE<br>T | PAGU            | TARGE<br>T | PAGU            | TARGE<br>T  | PAGU            |   |
| (01)  | (02)   | (03)              | (04) | (05)                            | (06)            | (07)       | (08)            | (09)       | (10)            | (11)       | (12)            | (13)  | (14)            | (15)  |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN  |  |                   |      |                                 | 202.382.547.242 |            | 211.315.859.012 |            | 211.631.156.952 |            | 216.296.095.014 |   | 226.091.023.375 |   |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |  |                   |      |                                 | 67.860.675.714  |            | 71.833.183.814  |            | 69.955.189.714  |            | 70.155.189.714  |   | 73.285.180.014  |   |
| Meningkatnya Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dengan Baik dan Efisien Dinas | Persentase Dokumen<br>Perencanaan dan Evaluasi<br>yang disusun (%)                                 | 100               | 100  | 100                             | 67.860.675.714  | 100        | 71.833.183.814  | 100        | 69.955.189.714  | 100        | 70.155.189.714  | 100   | 73.285.180.014  | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase Laporan<br>Keuangan yang disusun<br>(%)   | 100               | 100  | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |                 |   |
|   | Persentase Sarana dan<br>Prasarana Aparatur yang<br>layak fungsi (%)                               | 100               | 100  | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |                 |   |
| 1.02.02 - PROGRAM<br>PEMENUHAN UPAYA<br>KESEHATAN PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN         |  |                   |      |                                 | 130.448.807.678 |            | 133.559.611.348 |            | 135.052.903.388 |            | 136.067.841.450 |   | 142.732.779.511 |   |
| Meningkatnya kualitas kesehatan<br>perorangan dan masyarakat Dinas<br>Kesehatan             | Cakupan kepesertaan aktif<br>Jaminan Kesehatan<br>Nasional (JKNI) (%)                              | 76,55             | 80   | 80,5                            | 130.448.807.678 | 90         | 133.559.611.348 | 90         | 135.052.903.388 | 90         | 136.067.841.450 | 90  | 142.732.779.511 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Cakupan pelayanan<br>kesehatan balita sesuai<br>standar (%)  | 97,52             | 100  | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |                 |   |
|   | Cakupan penemuan kasus<br>TB (%)   | 74,46             | 75   | 75                              |                 | 80         |                 | 80         |                 | 85         |                 | 90  |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase anak usia<br>pendidikan dasar yang<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan sesuai standar | 95,58             | 100  | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100   |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase bayi baru lahir<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan bayi baru lahir                   | 75,35             | 100  | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100   |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase<br>Desa/Kelurahan sanitasi<br>total berbasis masyarakat                                 | 0,2               | 20   | 22                              |                 | 25         |                 | 28         |                 | 30         |                 | 35  |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase fasilitas<br>kesehatan yang<br>terintegrasi dalam sistem<br>informasi kesehatan         | 0                 | 70   | 71                              |                 | 72         |                 | 73         |                 | 74         |                 | 75  |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase fasilitas<br>pelayanan kesehatan<br>dengan perbekalan                                   | 0                 | 83   | 86                              |                 | 89         |                 | 92         |                 | 95         |                 | 95  |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase fasilitas<br>pelayanan kesehatan<br>sesuai standar (%)                                  | 0                 | 70   | 73                              |                 | 76         |                 | 78         |                 | 81         |                 | 83  |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase ibu bersalin<br>mendapatkan pelayanan<br>persalinan (%)                                 | 77,08             | 100  | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100   |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase ibu hamil<br>mendapatkan pelayanan<br>kesehatan ibu hamil (%)                           | 62,56             | 100  | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100   |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
|   | Persentase merokok<br>penduduk 10-21 tahun (%)   | 10                | 11   | 12                              |                 | 13         |                 | 14         |                 | 15         |                 | 16  |                 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |

|   |   |       |      |     |               |      |               |     |               |      |               |     |   |   |
|---|---|-------|------|-----|---------------|------|---------------|-----|---------------|------|---------------|-----|---|---|
|   | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)                                      | 100   | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)                 | 100   | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)   | 100   | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)                                     | 100   | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan  | 100   | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                     | 100   | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)  | 0     | 70   | 71  |               | 72   |               | 73  |               | 74   |               | 75  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar                             | 82,38 | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Presentase lanjut usia yang mandiri (%)   | 75    | 75   | 77  |               | 79   |               | 81  |               | 83   |               | 85  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)  | 8     | 10   | 11  |               | 12   |               | 13  |               | 14   |               | 15  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)   | 24,71 | 25   | 25  |               | 25   |               | 25  |               | 25   |               | 25  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)  | 0     | 77   | 78  |               | 79   |               | 80  |               | 81   |               | 83  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA                               |   |       |      |     | 3.169.931.000 |      | 4.669.931.000 |     | 5.169.931.000 |      | 8.169.931.000 |     | 8.169.931.000                               |   |
| Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan   | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)   | 80    | 92   | 92  | 3.169.931.000 | 92   | 4.669.931.000 | 96  | 5.169.931.000 | 96   | 8.169.931.000 | 96  | 8.169.931.000                               | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
|   | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)   | 100   | 100  | 100 |               | 100  |               | 100 |               | 100  |               | 100 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000)  | 2,9   | 3    | 3   |               | 3,1  |               | 3,1 |               | 3,2  |               | 3,2 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                     |   |       |      |     | 466.030.850   |      | 716.030.850   |     | 716.030.850   |      | 966.030.850   |     | 966.030.850                                 |   |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persvaratan   | 0     | 100  | 100 | 466.030.850   | 100  | 716.030.850   | 100 | 716.030.850   | 100  | 966.030.850   | 100 | 966.030.850                                 | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |
|   | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)  | 0     | 75   | 76  |               | 77   |               | 78  |               | 78   |               | 80  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase penerbitan dan pemenuan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)  | 0     | 10   | 20  |               | 30   |               | 40  |               | 50   |               | 60  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh | 0     | 83,5 | 84  |               | 84,5 |               | 85  |               | 85,5 |               | 86  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   | Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan (%)   | 0     | 24   | 26  |               | 28   |               | 30  |               | 32   |               | 34  | Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan |   |
|   |   |       |      |     |               |      |               |     |               |      |               |     |   |   |

|  |   |    |    |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |    |                 |   |
|--|---|----|----|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|---|
| 1.02.05 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   |   |    |    |    | 437.102.000     |    | 537.102.000     |    | 737.102.000     |    | 937.102.000     |    | 937.102.000     |   |
| Meningkatnya kualitas<br>pemberdayaan masyarakat bidang<br>kesehatan Dinas Kesehatan | Persentase Masyarakat<br>Bidang Kesehatan yang<br>Diberdayakan (Persentase) | 35 | 36 | 37 | 437.102.000     | 38 | 537.102.000     | 39 | 737.102.000     | 40 | 937.102.000     | 41 | 937.102.000     | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Kesehatan |
| TOTAL KESELURUHAN  |   |    |    |    | 202.382.547.242 | -  | 211.315.859.012 | -  | 211.631.156.952 | -  | 216.296.095.014 | -  | 226.091.023.375 |   |

#### **4.2. Uraian Kegiatan**

Uraian kegiatan dalam Renstra merupakan penjabaran program – program kerja yang lebih detail dan operasional yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau instansi dalam periode tertentu, biasanya lima tahun. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah nyata yang akan diambil untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, meliputi tujuan, target, waktu pelaksanaan, sumber daya yang dibutuhkan, penanggung jawab, serta identifikasi risiko dan strategi untuk mengatasinya. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Kesehatan dapat dilihat di Tabel 4.2.

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN             | TUJUAN                                    | SASARAN   | OUTCOME | OUTPUT   | INDIKATOR  | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  | KETERANGAN |
|---|---|---|---------|--|--|---|------------|
| (01)  | (02)                                      | (03)  | (04)    | (05)   | (06)   | (07)  | (08)       |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan</b> |   |   |         |  |  |   |            |
| - 3.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan |   |         |  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))   |   |            |
|   |   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah                       |         |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)  |   |            |
|   |   |   |         |  | Nilai SAKIP (Angka)  |   |            |
|   |   | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Dinas Kesehatan |         |  | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (%)   | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |            |
|   |   |   |         |  | Persentase Laporan Keuangan yang disusun (%)   | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |            |
|   |   |   |         |  | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (%)   | 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           |            |
|   |   |   |         | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara) | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|   |   |   |         |  | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)   | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |
|   |   |   |         |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |            |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)  | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)   | 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)  | 1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah             |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                  |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD        |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                          |  |

|  |  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)   | 1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)   | 1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah  |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)               | 1.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |
|  |  |  |  | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)   | 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)   | 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)  | 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)   | 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |

|  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  |  |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)  | 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)  | 1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |
|  |  |  |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)  | 1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |
|  |  |  |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)   | 1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |
|  |  |  |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)                                 | 1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |
|  |  |  |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)   | 1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                          |  |
|  |  |  |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | 1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |
|  |  |  |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)   | 1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |
|  |  |  | Tersedianya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)  | 1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |
|  |  |  |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)  | 1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |



|  |  |  |  |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--|
|  |  |  |  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)                    | 1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)   | 1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                 | 1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |
|  |  |  |  | Tersedianya barang sesuai kebutuhan Perangkat Daerah                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                  | 1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                  | 1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |  |
|  |  |  |  | Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  |
|  |  |  |  | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |

|   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
|   |  |  |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat |  |  |  | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))  |   |  |
|   |  |  |  | Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)   |   |  |
|   |  |  |  | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))  |   |  |
|   |  |  |  | Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)  |   |  |
|   |  |  |  | Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)   |   |  |
|   |  |  |  | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))                                     |   |  |
|   |  |  |  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                       |   |  |
|   |  |  |  | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)  |   |  |
|   |  |  |  | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)  |   |  |
|   |  |  |  |   |   |  |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan         |  |  |  | Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)  | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |  |
|   |  |  |  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)   | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |  |
|   |  |  |  | Cakupan penemuan kasus TB (%)   | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |  |
|   |  |  |  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                 | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)                 | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)                               | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%) | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)        | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                                    | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)                       | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)                 | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)  | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |
| Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%) | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Presentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)</p> | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)</p>                               | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)</p>                     | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)</p>                         | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)</p>                 | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)</p>  | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)</p>         | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Presentase lanjut usia yang mandiri (%)</p>   | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |
| <p>Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)</p>  | <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)  | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      |  |
|  |  |  |  |  | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)   | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                      |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)                                    | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)  | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)               | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)                           | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)              | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit) | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)  | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)  | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)                             | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         |  |
| Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)  | 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya  |  |
| Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)  | 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas   |  |
| Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)                             | 1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  |  |
| Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)  | 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    |  |
| Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit) | 1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  |  |
| Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)                                    | 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan               |  |
| Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)              | 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  |
| Jumlah Keluarga yang Sudah Kunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)                             | 1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  |  |

|  |  |  |  |   |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
|  |  |  |  |   | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) | 1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                      | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |  |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |  |

|  |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)               | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |



|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                               | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)                                       | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)                              | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)                  | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                              | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                    | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                    | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                 | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)   | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) | 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)   | 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                       |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)  | 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)   | 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)  | 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                      | 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)   | 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)  | 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)  | 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                 |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                                      | 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)                          | 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)                                      | 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)   | 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) | 1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)   | 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)  | 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)  | 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)   | 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)  | 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)   | 1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)                | 1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                 |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)  | 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)  | 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)     | 1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional      |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)  | 1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)   | 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |

|  |  |   |   |  |   |  |
|--|--|---|---|--|---|--|
|  |  |   |   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)   | 1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |  |
|  |  |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)   | 1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah   |  |
|  |  |   |   | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)                                       | 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |  |
|  |  |   |   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)  | 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |  |
|  |  |   | Terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)  | 1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |  |
|  |  |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)  | 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |  |
|  |  |   | Terlaksananya Pemberian Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)                      | 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |  |
|  |  |   |   | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                     |  |
|  |  |   |   | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) | 1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |  |
|  |  |   |   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)                      | 1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  |  |
|  |  |   |   |  |   |  |
|  |  | Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar |   | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)   |   |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman |   | Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)  | 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  |  |
|   |   | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)   | 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  |  |
|   |   | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)  | 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  |  |
|   |   | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (%)  | 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  |  |
|   |   | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)   | 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  |  |
|   | Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)   | 1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  |  |
|   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)   | 1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                        |  |
|   | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | 1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |  |

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) | 1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)                             | 1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)   |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)                             | 1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)   | 1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)   | 1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   |  |

|  |  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  |  |   | Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                |  |
|  |  |  |   |  | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) | 1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan |  |
|  |  |  | Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan            |  | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)   |  |  |
|  |  |  | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan |  | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)   | 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  |  |
|  |  |  |   |  | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar (%)   | 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  |  |
|  |  |  |   |  | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)   | 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  |  |
|  |  |  |   | Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)                                     | 1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   |  |
|  |  |  |   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)                                     | 1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                     |  |
|  |  |  |   |  | Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                      | 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                         |  |

|  |  |   |  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)            | 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota     |  |
|  |  |   |  |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)     | 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota     |  |
|  |  |   |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)            | 1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |  |
|  |  |   |  |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)     | 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar   |  |
|  |  |   |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)                               | 1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |  |
|  |  |   |  | Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |  |
|  |  |   |  |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) | 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |
|  |  | Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat |  |  | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)  |  |  |
|  |  |   | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan |  | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)   | 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |  |
|  |  |   |  | Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)                         | 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |



|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit) | 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)   | 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                             |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit) | 1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman    |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya kegiatan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)                                       | 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)                                       | 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)                            | 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)                            | 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)     |  |

#### **4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif**

Uraian subkegiatan dalam Renstra adalah bagian yang merinci langkah-langkah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini mencakup penjelasan detail tugas dari subkegiatan, indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, target kinerja kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai, serta pagu indikatif atau perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan subkegiatan tersebut selama periode Renstra Tahun 2025 – 2029. Indikator Kinerja Daerah Rancangan Akhir dapat dilihat di Tabel 4.3 IKD

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH**  
**RANCANGAN AKHIR**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

| NO                                       | INDIKATOR   | SATUAN     | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |       |       |       |      |      | KETERANGAN |
|--|---|------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|------|------|------------|
|  |   |            |                  | 2025         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029 | 2030 |            |
| (01)                                     | (02)  | (03)       | (04)             | (05)         | (06)  | (07)  | (08)  | (09) | (10) | (11)       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |   |            |                  |              |       |       |       |      |      |            |
| I  | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  |            |                  |              |       |       |       |      |      |            |
| 1  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)  | (%)        | 98,35            | 98,5         | 98,76 | 98,88 | 98,92 | 99   | 99   |            |
| II                                       | INDIKATOR KINERJA KUNCI   |            |                  |              |       |       |       |      |      |            |
| 1  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | %          | 100              | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 2  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar   | %          | 100              | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 3  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar  | %          | 100              | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 4  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar   | %          | 0                | 70           | 73    | 76    | 78    | 81   | 83   |            |
| 5  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar   | %          | 0                | 83           | 86    | 89    | 92    | 95   | 95   |            |
| 6  | Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat  | %          | 0,2              | 20           | 22    | 25    | 28    | 30   | 35   |            |
| 7  | Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan   | %          | 0                | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 8  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | %          | 95,58            | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 9  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | %          | 97,52            | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 10                                       | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir  | %          | 75,35            | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 11                                       | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan  | %          | 77,08            | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 12                                       | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil  | %          | 62,56            | 100          | 100   | 100   | 100   | 100  | 100  |            |
| 13                                       | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah | %          | 0                | 83,5         | 84    | 84,5  | 85    | 85,5 | 86   |            |
| 14                                       | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan  | Persentase | 35               | 36           | 37    | 38    | 39    | 40   | 41   |            |
| 15                                       | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu  | %          | 0                | 75           | 76    | 77    | 78    | 78   | 80   |            |
| 16                                       | Cakupan penemuan kasus TB   | %          | 74,46            | 75           | 75    | 80    | 80    | 85   | 90   |            |
| 17                                       | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun   | %          | 10               | 11           | 12    | 13    | 14    | 15   | 16   |            |
| 18                                       | Persentase penerbitan dan pemenuan komitmen SPP - IRT sesuai standar  | %          | 0                | 10           | 20    | 30    | 40    | 50   | 60   |            |

|    |   |                   |       |     |      |     |     |     |     |  |
|----|---|-------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 19 | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional          | %                 | 0     | 70  | 71   | 72  | 73  | 74  | 75  |  |
| 20 | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat  | %                 | 0     | 70  | 71   | 72  | 73  | 74  | 75  |  |
| 21 | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan  | %                 | 0     | 77  | 78   | 79  | 80  | 81  | 83  |  |
| 22 | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar                                     | %                 | 100   | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Persentase Puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar  | %                 | 80    | 92  | 92   | 92  | 96  | 96  | 96  |  |
| 24 | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi   | Per 1000 Penduduk | 2,9   | 3   | 3    | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |  |
| 25 | Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  | %                 | 76,55 | 80  | 80,5 | 90  | 90  | 90  | 90  |  |
| 26 | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun   | %                 | 24,71 | 25  | 25   | 25  | 25  | 25  | 25  |  |
| 27 | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun  | %                 | 8     | 10  | 11   | 12  | 13  | 14  | 15  |  |
| 28 | Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan   | %                 | 0     | 24  | 26   | 28  | 30  | 32  | 34  |  |
| 29 | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun  | %                 | 100   | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 30 | Persentase Laporan Keuangan yang disusun  | %                 | 100   | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 31 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi  | %                 | 100   | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 32 | Persentase lanjut usia yang mandiri   | %                 | 75    | 75  | 77   | 79  | 81  | 83  | 85  |  |
| 33 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | %                 | 100   | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 34 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | %                 | 100   | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 35 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar         | %                 | 82,38 | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 36 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar                     | %                 | 100   | 100 | 100  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan dapat dilihat di Tabel 4.4 V2

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 | PERANGKAT<br>DAERAH                             | KETERANGAN |  |  |  |  |  |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|---|------------|--|--|--|--|--|
|   |   |                           | 2026                            |                 | 2027       |                 | 2028       |                 | 2029       |                 | 2030       |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   |   |                           | TARGE<br>T                      | PAGU            | TARGE<br>T | PAGU            | TARGE<br>T | PAGU            | TARGE<br>T | PAGU            | TARGE<br>T | PAGU            |   |            |  |  |  |  |  |
| (01)  | (02)  | (03)                      | (04)                            | (05)            | (06)       | (07)            | (08)       | (09)            | (10)       | (11)            | (12)       | (13)            | (14)  | (15)       |  |  |  |  |  |
| 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN  |   |                           |                                 | 488.909.525.542 |            | 524.095.527.792 |            | 536.605.855.425 |            | 555.745.719.773 |            | 582.624.254.855 |   |            |  |  |  |  |  |
| 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA                 |   |                           |                                 | 333.587.377.014 |            | 359.922.561.744 |            | 369.305.082.804 |            | 383.125.986.492 |            | 402.182.063.569 |   |            |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>dengan Baik dan Efisien Dinas | Persentase Sarana dan<br>Prasarana Aparatur yang layak<br>fungsi (%)  | 100                       | 100                             | 67.860.675.714  | 100        | 71.833.183.814  | 100        | 69.955.189.714  | 100        | 70.155.189.714  | 100        | 73.285.180.014  | 1.02.0.00.0.00.01.0<br>000 - Dinas<br>Kesehatan |            |  |  |  |  |  |
|   | Persentase Dokumen<br>Perencanaan dan Evaluasi  | 100                       | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Persentase Laporan Keuangan<br>yang disusun (%)   | 100                       | 100                             |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 | 100        |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   |   |                           |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |   |            |  |  |  |  |  |
| 1.02.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah       |   |                           |                                 | 263.612.000     |            | 263.612.000     |            | 263.612.000     |            | 263.612.000     |            | 263.612.000     |   |            |  |  |  |  |  |
| Tersedianya Dokumen<br>Perencanaan, Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD (Dokumen) | 1                         | 1                               | 263.612.000     | 1          | 263.612.000     | 1          | 263.612.000     | 1          | 263.612.000     | 1          | 263.612.000     |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan<br>Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       | 1                         | 1                               |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah Laporan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   | 2                         | 2                               |                 | 2          |                 | 2          |                 | 2          |                 | 2          |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD (Dokumen)   | 1                         | 1                               |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)  | 2                         | 2                               |                 | 2          |                 | 2          |                 | 2          |                 | 2          |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD (Dokumen)  | 6                         | 6                               |                 | 6          |                 | 6          |                 | 6          |                 | 6          |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah Data Statistik Sektoral<br>Daerah yang Telah<br>Dikumpulkan dan Diperiksa<br>Linkup Perangkat Daerah   | 1                         | 1                               |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   | Jumlah Berita Acara Hasil<br>Forum Perangkat Daerah<br>Berdasarkan Bidang Urusan<br>yang Diampu dalam Rangka<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                          | 1                         | 1                               |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 | 1          |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   |   |                           |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |   |            |  |  |  |  |  |
|   |   |                           |                                 |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |                 |   |            |  |  |  |  |  |
| 1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                   |   |                           |                                 | 67.262.000      |            | 67.262.000      |            | 67.262.000      |            | 67.262.000      |            | 67.262.000      |   |            |  |  |  |  |  |
| Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah (Dokumen)  | 6                         | 6                               | 67.262.000      | 6          | 67.262.000      | 6          | 67.262.000      | 6          | 67.262.000      | 6          | 67.262.000      |   |            |  |  |  |  |  |
| 1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           |   |                           |                                 | 12.894.000      |            | 12.894.000      |            | 12.894.000      |            | 12.894.000      |            | 12.894.000      |   |            |  |  |  |  |  |

|  |  |     |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |  |  |
|--|--|-----|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|--|
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)   | 1   | 1     | 12.894.000     | 1     | 12.894.000     | 1     | 12.894.000     | 1     | 12.894.000     | 1     | 12.894.000     |  |  |
| 1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |     |       | 8.794.000      |       | 8.794.000      |       | 8.794.000      |       | 8.794.000      |       | 8.794.000      |  |  |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-   | 1   | 1     | 8.794.000      | 1     | 8.794.000      | 1     | 8.794.000      | 1     | 8.794.000      | 1     | 8.794.000      |  |  |
| 1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |     |       | 14.967.200     |       | 14.967.200     |       | 14.967.200     |       | 14.967.200     |       | 14.967.200     |  |  |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)   | 1   | 1     | 14.967.200     | 1     | 14.967.200     | 1     | 14.967.200     | 1     | 14.967.200     | 1     | 14.967.200     |  |  |
| 1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |  |     |       | 5.881.200      |       | 5.881.200      |       | 5.881.200      |       | 5.881.200      |       | 5.881.200      |  |  |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-   | 2   | 2     | 5.881.200      | 2     | 5.881.200      | 2     | 5.881.200      | 2     | 5.881.200      | 2     | 5.881.200      |  |  |
| 1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2   | 2     | 25.949.100     | 2     | 25.949.100     | 2     | 25.949.100     | 2     | 25.949.100     | 2     | 25.949.100     |  |  |
| 1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |     |       | 75.514.500     |       | 75.514.500     |       | 75.514.500     |       | 75.514.500     |       | 75.514.500     |  |  |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1   | 1     | 75.514.500     | 1     | 75.514.500     | 1     | 75.514.500     | 1     | 75.514.500     | 1     | 75.514.500     |  |  |
| 1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah   |  |     |       | 50.000.000     |       | 50.000.000     |       | 50.000.000     |       | 50.000.000     |       | 50.000.000     |  |  |
| Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah   | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah  | 1   | 1     | 50.000.000     | 1     | 50.000.000     | 1     | 50.000.000     | 1     | 50.000.000     | 1     | 50.000.000     |  |  |
| 1.02.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |     |       | 2.350.000      |       | 2.350.000      |       | 2.350.000      |       | 2.350.000      |       | 2.350.000      |  |  |
| Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Jumlah Berta Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     | 1   | 1     | 2.350.000      | 1     | 2.350.000      | 1     | 2.350.000      | 1     | 2.350.000      | 1     | 2.350.000      |  |  |
| 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |  |     |       | 65.392.540.700 |       | 69.065.048.800 |       | 67.187.054.700 |       | 67.187.054.700 |       | 70.317.045.000 |  |  |
| Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)   | 2   | 2     | 65.392.540.700 | 2     | 69.065.048.800 | 2     | 67.187.054.700 | 2     | 67.187.054.700 | 2     | 70.317.045.000 |  |  |
|  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 850 | 1.184 |                | 1.184 |                | 1.184 |                | 1.184 |                | 1.184 |                |  |  |
|  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran                          | 12  | 12    |                | 12    |                | 12    |                | 12    |                | 12    |                |  |  |
|  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1   | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |  |  |

|   |  |     |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |  |  |
|---|--|-----|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|--|
|   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan   | 1   | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis  | 2   | 2     |                | 2     |                | 2     |                | 2     |                | 2     |                |  |  |
|   | Realisasi Anggaran (Dokumen)   |     |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)   | 3   | 3     |                | 3     |                | 3     |                | 3     |                | 3     |                |  |  |
| 1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |     |       | 65.373.127.700 |       | 69.045.635.800 |       | 67.167.641.700 |       | 67.167.641.700 |       | 70.297.632.000 |  |  |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 850 | 1.184 | 65.373.127.700 | 1.184 | 69.045.635.800 | 1.184 | 67.167.641.700 | 1.184 | 67.167.641.700 | 1.184 | 70.297.632.000 |  |  |
| 1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan   |  |     |       | 5.000.000      |       | 5.000.000      |       | 5.000.000      |       | 5.000.000      |       | 5.000.000      |  |  |
| Pengujian/Verifikasi Keuangan   |  |     |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |  |  |
| Terlaksananya Penatausahaan dan   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan   | 1   | 1     | 5.000.000      | 1     | 5.000.000      | 1     | 5.000.000      | 1     | 5.000.000      | 1     | 5.000.000      |  |  |
| Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Pengujian/Verifikasi Keuangan  |     |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |  |  |
| 1.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |     |       | 1.945.000      |       | 1.945.000      |       | 1.945.000      |       | 1.945.000      |       | 1.945.000      |  |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)   | 3   | 3     | 1.945.000      | 3     | 1.945.000      | 3     | 1.945.000      | 3     | 1.945.000      | 3     | 1.945.000      |  |  |
| 1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |  |     |       | 3.182.000      |       | 3.182.000      |       | 3.182.000      |       | 3.182.000      |       | 3.182.000      |  |  |
| Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1   | 1     | 3.182.000      | 1     | 3.182.000      | 1     | 3.182.000      | 1     | 3.182.000      | 1     | 3.182.000      |  |  |
| 1.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan   |  |     |       | 2.100.000      |       | 2.100.000      |       | 2.100.000      |       | 2.100.000      |       | 2.100.000      |  |  |
| Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)   | 2   | 2     | 2.100.000      | 2     | 2.100.000      | 2     | 2.100.000      | 2     | 2.100.000      | 2     | 2.100.000      |  |  |
| 1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran  |  |     |       | 4.513.000      |       | 4.513.000      |       | 4.513.000      |       | 4.513.000      |       | 4.513.000      |  |  |
| Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12  | 12    | 4.513.000      | 12    | 4.513.000      | 12    | 4.513.000      | 12    | 4.513.000      | 12    | 4.513.000      |  |  |
| 1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |  |     |       | 2.673.000      |       | 2.673.000      |       | 2.673.000      |       | 2.673.000      |       | 2.673.000      |  |  |
| Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)   | 2   | 2     | 2.673.000      | 2     | 2.673.000      | 2     | 2.673.000      | 2     | 2.673.000      | 2     | 2.673.000      |  |  |
| 1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah   |  |     |       | 110.000.000    |       | 110.000.000    |       | 110.000.000    |       | 110.000.000    |       | 110.000.000    |  |  |
| Tersedianya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi   | 12  | 12    | 110.000.000    | 12    | 110.000.000    | 12    | 110.000.000    | 12    | 110.000.000    | 12    | 110.000.000    |  |  |
|   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)   | 1   | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |  |  |
|   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)   | 1   | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |  |  |
|   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)  | 1   | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |  |  |



|  |   |       |      |                 |     |                 |     |                 |     |                 |     |                 |  |  |
|--|---|-------|------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|--|--|
| 1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi  |   |       |      | 5.000.000       |     | 5.000.000       |     | 5.000.000       |     | 5.000.000       |     | 5.000.000       |  |  |
| Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang                                       | 1     | 1    | 5.000.000       | 1   | 5.000.000       | 1   | 5.000.000       | 1   | 5.000.000       | 1   | 5.000.000       |  |  |
| 1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |       |      | 1.000.000       |     | 1.000.000       |     | 1.000.000       |     | 1.000.000       |     | 1.000.000       |  |  |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1     | 1    | 1.000.000       | 1   | 1.000.000       | 1   | 1.000.000       | 1   | 1.000.000       | 1   | 1.000.000       |  |  |
| 1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  |   |       |      | 4.000.000       |     | 4.000.000       |     | 4.000.000       |     | 4.000.000       |     | 4.000.000       |  |  |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)   | 1     | 1    | 4.000.000       | 1   | 4.000.000       | 1   | 4.000.000       | 1   | 4.000.000       | 1   | 4.000.000       |  |  |
| 1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi   |   |       |      | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |  |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi  | 12    | 12   | 100.000.000     | 12  | 100.000.000     | 12  | 100.000.000     | 12  | 100.000.000     | 12  | 100.000.000     |  |  |
| 1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |       |      | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |  |  |
| Tersedianya barang sesuai kebutuhan Perangkat Daerah   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                  | 1     | 1    | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     |  |  |
| 1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |   |       |      | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |     | 100.000.000     |  |  |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                                  | 1     | 1    | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     | 1   | 100.000.000     |  |  |
| 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan   |   |       |      | 1.856.226.314   |     | 2.156.226.314   |     | 2.156.226.314   |     | 2.356.226.314   |     | 2.356.226.314   |  |  |
| Terpenuhinya kebutuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12    | 12   | 1.856.226.314   | 12  | 2.156.226.314   | 12  | 2.156.226.314   | 12  | 2.356.226.314   | 12  | 2.356.226.314   |  |  |
|  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12    | 12   |                 | 12  |                 | 12  |                 | 12  |                 | 12  |                 |  |  |
| 1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air  |   |       |      | 403.555.251     |     | 403.555.251     |     | 403.555.251     |     | 403.555.251     |     | 403.555.251     |  |  |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                        | 12    | 12   | 403.555.251     | 12  | 403.555.251     | 12  | 403.555.251     | 12  | 403.555.251     | 12  | 403.555.251     |  |  |
| 1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |       |      | 1.452.671.063   |     | 1.752.671.063   |     | 1.752.671.063   |     | 1.952.671.063   |     | 1.952.671.063   |  |  |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12    | 12   | 1.452.671.063   | 12  | 1.752.671.063   | 12  | 1.752.671.063   | 12  | 1.952.671.063   | 12  | 1.952.671.063   |  |  |
| 1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       |   |       |      | 138.296.700     |     | 138.296.700     |     | 138.296.700     |     | 138.296.700     |     | 138.296.700     |  |  |
| Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1     | 1    | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     |  |  |
| 1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau |   |       |      | 138.296.700     |     | 138.296.700     |     | 138.296.700     |     | 138.296.700     |     | 138.296.700     |  |  |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 1     | 1    | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     | 1   | 138.296.700     |  |  |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)                       | 100   | 100  | 130.448.807.678 | 100 | 133.559.611.348 | 100 | 135.052.903.388 | 100 | 136.067.841.450 | 100 | 142.732.779.511 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |  |
|  | Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional  | 76,55 | 80,5 |                 | 90  |                 | 90  |                 | 90  |                 | 90  |                 |  |  |

|  |  |       |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |  |
|--|--|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--|
|  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)  | 97,52 | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Cakupan penemuan kasus TB (%)  | 74,46 | 75    |                | 80    |                | 80    |                | 85    |                | 90    |                |  |
|  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan   | 95,58 | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)   | 75,35 | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)   | 0,2   | 22    |                | 25    |                | 28    |                | 30    |                | 35    |                |  |
|  | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional                             | 0     | 71    |                | 72    |                | 73    |                | 74    |                | 75    |                |  |
|  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)                                | 0     | 86    |                | 89    |                | 92    |                | 95    |                | 95    |                |  |
|  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)  | 0     | 73    |                | 76    |                | 78    |                | 81    |                | 83    |                |  |
|  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)   | 77,08 | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan   | 62,56 | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)  | 10    | 12    |                | 13    |                | 14    |                | 15    |                | 16    |                |  |
|  | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar   | 100   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                    | 100   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)  | 100   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)                                    | 100   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)  | 100   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)   | 0     | 71    |                | 72    |                | 73    |                | 74    |                | 75    |                |  |
|  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)                        | 82,38 | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |
|  | Persentase lanjut usia yang mandiri (%)  | 75    | 77    |                | 79    |                | 81    |                | 83    |                | 85    |                |  |
|  | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)   | 8     | 11    |                | 12    |                | 13    |                | 14    |                | 15    |                |  |
|  | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)  | 24,71 | 25    |                | 25    |                | 25    |                | 25    |                | 25    |                |  |
|  | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan   | 0     | 78    |                | 79    |                | 80    |                | 81    |                | 83    |                |  |
| 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |  |       |       | 49.500.374.107 |       | 54.611.177.777 |       | 56.104.469.817 |       | 57.119.407.879 |       | 63.784.345.940 |  |
| Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota               | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) | 4.920 | 4.920 | 49.500.374.107 | 4.920 | 54.611.177.777 | 4.920 | 56.104.469.817 | 4.920 | 57.119.407.879 | 4.920 | 63.784.345.940 |  |
|  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                 | 158   | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                | 100   |                |  |

|   |   |     |     |                |     |                |     |                |     |                |     |                |  |  |
|---|---|-----|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|
|   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)                                     | 10  | 6   |                | 8   |                | 8   |                | 8   |                | 10  |                |  |  |
|   | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)                           | 1   | 1   |                | 1   |                | 1   |                | 1   |                | 1   |                |  |  |
|   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                       | 8   | 10  |                | 12  |                | 14  |                | 16  |                | 17  |                |  |  |
|   | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)                             | 0   | 1   |                | 1   |                | 1   |                | 1   |                | 1   |                |  |  |
|   | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                    | 5   | 5   |                | 5   |                | 5   |                | 5   |                | 5   |                |  |  |
|   | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional              | 29  | 29  |                | 29  |                | 29  |                | 29  |                | 29  |                |  |  |
|   | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) | 2   | 2   |                | 2   |                | 2   |                | 2   |                | 2   |                |  |  |
| 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya   |   |     |     | 2.819.355.550  |     | 3.819.355.550  |     | 4.319.355.550  |     | 4.619.355.550  |     | 4.669.355.550  |  |  |
| Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000   | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)                             | 0   | 1   | 2.819.355.550  | 1   | 3.819.355.550  | 1   | 4.319.355.550  | 1   | 4.619.355.550  | 1   | 4.669.355.550  |  |  |
| 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas  |   |     |     | 11.279.544.200 |     | 11.779.544.200 |     | 12.779.544.200 |     | 13.279.544.200 |     | 13.279.544.200 |  |  |
| Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar   | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                                    | 5   | 5   | 11.279.544.200 | 5   | 11.779.544.200 | 5   | 12.779.544.200 | 5   | 13.279.544.200 | 5   | 13.279.544.200 |  |  |
| 1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas   |   |     |     | 7.230.799.700  |     | 8.230.799.700  |     | 8.730.799.700  |     | 9.230.799.700  |     | 9.613.100.587  |  |  |
| Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas                              | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                       | 8   | 10  | 7.230.799.700  | 12  | 8.230.799.700  | 14  | 8.730.799.700  | 16  | 9.230.799.700  | 17  | 9.613.100.587  |  |  |
| 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |   |     |     | 15.008.141.607 |     | 15.545.050.000 |     | 16.545.050.000 |     | 17.545.050.000 |     | 21.645.050.000 |  |  |
| Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)                                     | 10  | 6   | 15.008.141.607 | 8   | 15.545.050.000 | 8   | 16.545.050.000 | 8   | 17.545.050.000 | 10  | 21.645.050.000 |  |  |
| 1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   |   |     |     | 269.369.000    |     | 269.369.000    |     | 269.369.000    |     | 269.369.000    |     | 269.369.000    |  |  |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance | Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional              | 29  | 29  | 269.369.000    | 29  | 269.369.000    | 29  | 269.369.000    | 29  | 269.369.000    | 29  | 269.369.000    |  |  |
| 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                            |   |     |     | 60.000.000     |     | 60.000.000     |     | 60.000.000     |     | 60.000.000     |     | 60.000.000     |  |  |
| Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                              | 158 | 100 | 60.000.000     | 100 | 60.000.000     | 100 | 60.000.000     | 100 | 60.000.000     | 100 | 60.000.000     |  |  |

|   |   |        |        |                |        |                |        |                |        |                |        |                |  |  |
|---|---|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|--|
| 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas                           |   |        |        | 12.468.240.050 |        | 14.542.135.327 |        | 13.035.427.367 |        | 11.750.365.429 |        | 13.883.002.603 |  |  |
| Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                                    | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)   | 2      | 2      | 12.468.240.050 | 2      | 14.542.135.327 | 2      | 13.035.427.367 | 2      | 11.750.365.429 | 2      | 13.883.002.603 |  |  |
| 1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga   |   |        |        | 270.600.000    |        | 270.600.000    |        | 270.600.000    |        | 270.600.000    |        | 270.600.000    |  |  |
| Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga   | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)  | 4.920  | 4.920  | 270.600.000    | 4.920  | 270.600.000    | 4.920  | 270.600.000    | 4.920  | 270.600.000    | 4.920  | 270.600.000    |  |  |
| 1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan |   |        |        | 94.324.000     |        | 94.324.000     |        | 94.324.000     |        | 94.324.000     |        | 94.324.000     |  |  |
| Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan       | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Paket)  | 1      | 1      | 94.324.000     | 1      | 94.324.000     | 1      | 94.324.000     | 1      | 94.324.000     | 1      | 94.324.000     |  |  |
| 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah  |   |        |        | 79.473.125.871 |        | 77.473.125.871 |        | 77.473.125.871 |        | 77.473.125.871 |        | 77.473.125.871 |  |  |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)   | 9      |        | 79.473.125.871 | 9      | 77.473.125.871 | 9      | 77.473.125.871 | 9      | 77.473.125.871 | 9      | 77.473.125.871 |  |  |
|   | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) | 12.155 | 9.572  |                | 9.615  |                | 9.656  |                | 9.695  |                | 9.733  |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 1.655  | 1.520  |                | 1.527  |                | 1.534  |                | 1.540  |                | 1.546  |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 13.569 | 8.741  |                | 7.501  |                | 6.615  |                | 5.941  |                | 5.420  |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 16.154 | 13.900 |                | 13.900 |                | 13.900 |                | 13.900 |                | 13.900 |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 13.569 | 8.741  |                | 7.501  |                | 6.615  |                | 5.941  |                | 5.420  |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 10.258 | 10.258 |                | 10.258 |                | 10.258 |                | 10.258 |                | 10.258 |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 9.428  | 9.620  |                | 9.789  |                | 9.832  |                | 9.999  |                | 10.038 |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 1      | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 1      | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 12     | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 86.767 | 86.767 |                | 86.767 |                | 86.767 |                | 86.767 |                | 86.767 |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 11     | 11     |                | 11     |                | 11     |                | 11     |                | 11     |                |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 24     | 24     |                | 24     |                | 24     |                | 24     |                | 24     |                |  |  |

|  |   |         |         |             |         |             |         |             |         |             |         |             |  |  |
|--|---|---------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|--|
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar      | 12      | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 24      | 4       |             | 4       |             | 4       |             | 4       |             | 4       |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | 22      | 22      |             | 22      |             | 22      |             | 22      |             | 22      |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 12      | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 8       | 8       |             | 8       |             | 8       |             | 8       |             | 8       |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis                                   | 12      | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             |  |  |
|  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 44.201  | 46.640  |             | 46.855  |             | 47.059  |             | 47.252  |             | 47.434  |             |  |  |
|  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 8.706   | 9.518   |             | 9.562   |             | 9.724   |             | 9.763   |             | 9.922   |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | 12      | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             |  |  |
|  | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)    | 1       | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             | 1       |             |  |  |
|  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)  | 0       | 250     |             | 250     |             | 250     |             | 250     |             | 250     |             |  |  |
|  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 500.201 | 498.340 |             | 497.340 |             | 495.790 |             | 494.320 |             | 492.890 |             |  |  |
|  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 123.217 | 138.012 |             | 138.012 |             | 138.012 |             | 139.000 |             | 139.000 |             |  |  |
|  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 71.154  | 56.796  |             | 57.050  |             | 57.293  |             | 57.526  |             | 57.748  |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)  | 7       | 5       |             | 5       |             | 5       |             | 5       |             | 5       |             |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)   | 12      | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             | 12      |             |  |  |
| 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil    |   |         |         | 136.205.000 |         | 136.205.000 |         | 136.205.000 |         | 136.205.000 |         | 136.205.000 |  |  |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 10.258  | 10.258  | 136.205.000 | 10.258  | 136.205.000 | 10.258  | 136.205.000 | 10.258  | 136.205.000 | 10.258  | 136.205.000 |  |  |
| 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin |   |         |         | 96.379.000  |         | 96.379.000  |         | 96.379.000  |         | 96.379.000  |         | 96.379.000  |  |  |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar     | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 9.428   | 9.620   | 96.379.000  | 9.789   | 96.379.000  | 9.832   | 96.379.000  | 9.999   | 96.379.000  | 10.038  | 96.379.000  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru    |   |         |         | 421.901.950 |         | 421.901.950 |         | 421.901.950 |         | 421.901.950 |         | 421.901.950 |  |  |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 8.706   | 9.518   | 421.901.950 | 9.562   | 421.901.950 | 9.724   | 421.901.950 | 9.763   | 421.901.950 | 9.922   | 421.901.950 |  |  |
| 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita       |   |         |         | 102.510.000 |         | 102.510.000 |         | 102.510.000 |         | 102.510.000 |         | 102.510.000 |  |  |

|   |  |         |         |               |         |               |         |               |         |               |         |               |  |  |
|---|--|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|--|
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 44.201  | 46.640  | 102.510.000   | 46.855  | 102.510.000   | 47.059  | 102.510.000   | 47.252  | 102.510.000   | 47.434  | 102.510.000   |  |  |
| 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                    |  |         |         | 69.665.000    |         | 69.665.000    |         | 69.665.000    |         | 69.665.000    |         | 69.665.000    |  |  |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)                            | 86.767  | 86.767  | 69.665.000    | 86.767  | 69.665.000    | 86.767  | 69.665.000    | 86.767  | 69.665.000    | 86.767  | 69.665.000    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   |  |         |         | 42.045.000    |         | 42.045.000    |         | 42.045.000    |         | 42.045.000    |         | 42.045.000    |  |  |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar   | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai   | 500.201 | 498.340 | 42.045.000    | 497.340 | 42.045.000    | 495.790 | 42.045.000    | 494.320 | 42.045.000    | 492.890 | 42.045.000    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Terlaksananya Pengelolaan                           |  |         |         | 18.340.000    |         | 18.340.000    |         | 18.340.000    |         | 18.340.000    |         | 18.340.000    |  |  |
| Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 123.217 | 138.012 | 18.340.000    | 138.012 | 18.340.000    | 138.012 | 18.340.000    | 139.000 | 18.340.000    | 139.000 | 18.340.000    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  |  |         |         | 6.540.000     |         | 6.540.000     |         | 6.540.000     |         | 6.540.000     |         | 6.540.000     |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar                                 | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 71.154  | 56.796  | 6.540.000     | 57.050  | 6.540.000     | 57.293  | 6.540.000     | 57.526  | 6.540.000     | 57.748  | 6.540.000     |  |  |
| 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                    |  |         |         | 571.926.560   |         | 571.926.560   |         | 571.926.560   |         | 571.926.560   |         | 571.926.560   |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar                           | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai  | 12.155  | 9.572   | 571.926.560   | 9.615   | 571.926.560   | 9.656   | 571.926.560   | 9.695   | 571.926.560   | 9.733   | 571.926.560   |  |  |
| 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                              |  |         |         | 158.967.000   |         | 158.967.000   |         | 158.967.000   |         | 158.967.000   |         | 158.967.000   |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai                                | 1.655   | 1.520   | 158.967.000   | 1.527   | 158.967.000   | 1.534   | 158.967.000   | 1.540   | 158.967.000   | 1.546   | 158.967.000   |  |  |
| 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                    |  |         |         | 2.451.244.000 |         | 2.451.244.000 |         | 2.451.244.000 |         | 2.451.244.000 |         | 2.451.244.000 |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai                              | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan   | 13.569  | 8.741   | 2.451.244.000 | 7.501   | 2.451.244.000 | 6.615   | 2.451.244.000 | 5.941   | 2.451.244.000 | 5.420   | 2.451.244.000 |  |  |
| 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                            |  |         |         | 795.059.000   |         | 795.059.000   |         | 795.059.000   |         | 795.059.000   |         | 795.059.000   |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar   | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan  | 16.154  | 13.900  | 795.059.000   | 13.900  | 795.059.000   | 13.900  | 795.059.000   | 13.900  | 795.059.000   | 13.900  | 795.059.000   |  |  |
| 1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian                           |  |         |         | 20.770.000    |         | 20.770.000    |         | 20.770.000    |         | 20.770.000    |         | 20.770.000    |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 12      | 12      | 20.770.000    | 12      | 20.770.000    | 12      | 20.770.000    | 12      | 20.770.000    | 12      | 20.770.000    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi  |  |         |         | 2.104.890.000 |         | 2.104.890.000 |         | 2.104.890.000 |         | 2.104.890.000 |         | 2.104.890.000 |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | 24      | 4       | 2.104.890.000 | 4       | 2.104.890.000 | 4       | 2.104.890.000 | 4       | 2.104.890.000 | 4       | 2.104.890.000 |  |  |
| 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  |  |         |         | 11.400.000    |         | 11.400.000    |         | 11.400.000    |         | 11.400.000    |         | 11.400.000    |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | 22      | 22      | 11.400.000    | 22      | 11.400.000    | 22      | 11.400.000    | 22      | 11.400.000    | 22      | 11.400.000    |  |  |

|   |   |    |     |                |     |                |     |                |     |                |     |                |  |  |
|---|---|----|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|--|--|
| 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  |   |    |     | 1.686.501.500  |     | 1.686.501.500  |     | 1.686.501.500  |     | 1.686.501.500  |     | 1.686.501.500  |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 12 | 12  | 1.686.501.500  | 12  | 1.686.501.500  | 12  | 1.686.501.500  | 12  | 1.686.501.500  | 12  | 1.686.501.500  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   |   |    |     | 298.808.200    |     | 298.808.200    |     | 298.808.200    |     | 298.808.200    |     | 298.808.200    |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)  | 7  | 5   | 298.808.200    | 5   | 298.808.200    | 5   | 298.808.200    | 5   | 298.808.200    | 5   | 298.808.200    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |   |    |     | 70.000.000     |     | 70.000.000     |     | 70.000.000     |     | 70.000.000     |     | 70.000.000     |  |  |
| Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) | 8  | 8   | 70.000.000     | 8   | 70.000.000     | 8   | 70.000.000     | 8   | 70.000.000     | 8   | 70.000.000     |  |  |
| 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |   |    |     | 144.870.000    |     | 144.870.000    |     | 144.870.000    |     | 144.870.000    |     | 144.870.000    |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)   | 12 | 12  | 144.870.000    | 12  | 144.870.000    | 12  | 144.870.000    | 12  | 144.870.000    | 12  | 144.870.000    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan  |   |    |     | 38.854.800     |     | 38.854.800     |     | 38.854.800     |     | 38.854.800     |     | 38.854.800     |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)  | 0  | 250 | 38.854.800     | 250 | 38.854.800     | 250 | 38.854.800     | 250 | 38.854.800     | 250 | 38.854.800     |  |  |
| 1.02.02.2.02.0024 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis                          |   |    |     | 31.347.500     |     | 31.347.500     |     | 31.347.500     |     | 31.347.500     |     | 31.347.500     |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis                                   | 12 | 12  | 31.347.500     | 12  | 31.347.500     | 12  | 31.347.500     | 12  | 31.347.500     | 12  | 31.347.500     |  |  |
| 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |   |    |     | 3.593.405.050  |     | 2.593.405.050  |     | 2.593.405.050  |     | 2.593.405.050  |     | 2.593.405.050  |  |  |
| Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 11 | 11  | 3.593.405.050  | 11  | 2.593.405.050  | 11  | 2.593.405.050  | 11  | 2.593.405.050  | 11  | 2.593.405.050  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  |   |    |     | 61.609.220.349 |     | 61.609.220.349 |     | 61.609.220.349 |     | 61.609.220.349 |     | 61.609.220.349 |  |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | 24 | 24  | 61.609.220.349 | 24  | 61.609.220.349 | 24  | 61.609.220.349 | 24  | 61.609.220.349 | 24  | 61.609.220.349 |  |  |
| 1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium                      |   |    |     | 14.180.000     |     | 14.180.000     |     | 14.180.000     |     | 14.180.000     |     | 14.180.000     |  |  |
| Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional             | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)    | 1  | 1   | 14.180.000     | 1   | 14.180.000     | 1   | 14.180.000     | 1   | 14.180.000     | 1   | 14.180.000     |  |  |
| 1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota  |   |    |     | 177.625.000    |     | 177.625.000    |     | 177.625.000    |     | 177.625.000    |     | 177.625.000    |  |  |
| Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   | 12 | 1   | 177.625.000    | 1   | 177.625.000    | 1   | 177.625.000    | 1   | 177.625.000    | 1   | 177.625.000    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas   |   |    |     | 611.779.000    |     | 611.779.000    |     | 611.779.000    |     | 611.779.000    |     | 611.779.000    |  |  |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 1  | 1   | 611.779.000    | 1   | 611.779.000    | 1   | 611.779.000    | 1   | 611.779.000    | 1   | 611.779.000    |  |  |
| 1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan   |   |    |     | 3.767.555.000  |     | 3.767.555.000  |     | 3.767.555.000  |     | 3.767.555.000  |     | 3.767.555.000  |  |  |
| Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)  | 1  | 1   | 3.767.555.000  | 1   | 3.767.555.000  | 1   | 3.767.555.000  | 1   | 3.767.555.000  | 1   | 3.767.555.000  |  |  |
| 1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon   |   |    |     | 6.965.000      |     | 6.965.000      |     | 6.965.000      |     | 6.965.000      |     | 6.965.000      |  |  |

|   |   |        |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |                                |  |
|---|---|--------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------------------------------|--|
| Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah  | 12     | 12    | 6.965.000     | 12    | 6.965.000     | 12    | 6.965.000     | 12    | 6.965.000     | 12    | 6.965.000     |                                |  |
| 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |   |        |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |                                |  |
| Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis   | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan   | 13.569 | 8.741 | 207.085.981   | 7.501 | 207.085.981   | 6.615 | 207.085.981   | 5.941 | 207.085.981   | 5.420 | 207.085.981   |                                |  |
| 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |   |        |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |       | 207.085.981   |                                |  |
| Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)   |        | 9     | 207.085.981   | 9     | 207.085.981   | 9     | 207.085.981   | 9     | 207.085.981   | 9     | 207.085.981   |                                |  |
| 1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara  |   |        |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |                                |  |
| Terkelolanya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)   | 1      | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   |                                |  |
| 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |   |        |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |       | 300.000.000   |                                |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)   | 1      | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   | 1     | 300.000.000   |                                |  |
| 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |   |        |       | 1.175.307.700 |       | 1.175.307.700 |       | 1.175.307.700 |       | 1.175.307.700 |       | 1.175.307.700 |                                |  |
| Terlaksananya Pemberian Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti                  | 7      | 7     | 1.175.307.700 | 7     | 1.175.307.700 | 7     | 1.175.307.700 | 7     | 1.175.307.700 | 7     | 1.175.307.700 |                                |  |
|   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)                   | 25     | 25    |               | 25    |               | 25    |               | 25    |               | 25    |               |                                |  |
| 1.02.02.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti                  | 7      | 7     | 28.796.000    | 7     | 28.796.000    | 7     | 28.796.000    | 7     | 28.796.000    | 7     | 28.796.000    |                                |  |
| 1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  |   |        |       | 1.146.511.700 |       | 1.146.511.700 |       | 1.146.511.700 |       | 1.146.511.700 |       | 1.146.511.700 |                                |  |
| Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)  | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)                   | 25     | 25    | 1.146.511.700 | 25    | 1.146.511.700 | 25    | 1.146.511.700 | 25    | 1.146.511.700 | 25    | 1.146.511.700 |                                |  |
| 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA   |   |        |       | 3.169.931.000 |       | 4.669.931.000 |       | 5.169.931.000 |       | 8.169.931.000 |       | 8.169.931.000 |                                |  |
| Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan   | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)   | 80     | 92    | 3.169.931.000 | 92    | 4.669.931.000 | 96    | 5.169.931.000 | 96    | 8.169.931.000 | 96    | 8.169.931.000 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas |  |
|   | Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)   | 2,9    | 3     |               | 3,1   |               | 3,1   |               | 3,2   |               | 3,2   |               |                                |  |
|   | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai   | 100    | 100   |               | 100   |               | 100   |               | 100   |               | 100   |               |                                |  |
| 1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota  |   |        |       | 8.943.000     |       | 8.943.000     |       | 8.943.000     |       | 30.993.000    |       | 30.993.000    |                                |  |
| Terlaksananya Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 11     | 16    | 8.943.000     | 16    | 8.943.000     | 16    | 8.943.000     | 16    | 30.993.000    | 16    | 30.993.000    |                                |  |



|   |   |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |  |
|---|---|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| 1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                |   |     |     | 8.943.000     |     | 8.943.000     |     | 8.943.000     |     | 30.993.000    |     | 30.993.000    |  |  |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) | 11  | 16  | 8.943.000     | 16  | 8.943.000     | 16  | 8.943.000     | 16  | 30.993.000    | 16  | 30.993.000    |  |  |
| 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah                   |   |     |     | 1.761.118.000 |     | 1.761.118.000 |     | 1.761.118.000 |     | 3.311.118.000 |     | 3.311.118.000 |  |  |
| Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah                     | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes) (Orang)                 | 201 | 350 | 1.761.118.000 | 350 | 1.761.118.000 | 350 | 1.761.118.000 | 350 | 3.311.118.000 | 350 | 3.311.118.000 |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia   | 39  | 58  |               | 58  |               | 58  |               | 58  |               | 58  |               |  |  |
|   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)                        | 1   | 29  |               | 29  |               | 29  |               | 29  |               | 29  |               |  |  |
| 1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                       |   |     |     | 28.848.000    |     | 28.848.000    |     | 28.848.000    |     | 78.848.000    |     | 78.848.000    |  |  |
| Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)                        | 1   | 29  | 28.848.000    | 29  | 28.848.000    | 29  | 28.848.000    | 29  | 78.848.000    | 29  | 78.848.000    |  |  |
| 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |   |     |     | 1.488.417.000 |     | 1.488.417.000 |     | 1.488.417.000 |     | 2.488.417.000 |     | 2.488.417.000 |  |  |
| Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar                                  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes) (Orang)                 | 201 | 350 | 1.488.417.000 | 350 | 1.488.417.000 | 350 | 1.488.417.000 | 350 | 2.488.417.000 | 350 | 2.488.417.000 |  |  |
| 1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |   |     |     | 243.853.000   |     | 243.853.000   |     | 243.853.000   |     | 743.853.000   |     | 743.853.000   |  |  |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia   | 39  | 58  | 243.853.000   | 58  | 243.853.000   | 58  | 243.853.000   | 58  | 743.853.000   | 58  | 743.853.000   |  |  |
| 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      |   |     |     | 1.399.870.000 |     | 2.899.870.000 |     | 3.399.870.000 |     | 4.827.820.000 |     | 4.827.820.000 |  |  |
| Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan                                   | 201 | 350 | 1.399.870.000 | 350 | 2.899.870.000 | 350 | 3.399.870.000 | 350 | 4.827.820.000 | 350 | 4.827.820.000 |  |  |
| 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |   |     |     | 1.399.870.000 |     | 2.899.870.000 |     | 3.399.870.000 |     | 4.827.820.000 |     | 4.827.820.000 |  |  |
| Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan                                   | 201 | 350 | 1.399.870.000 | 350 | 2.899.870.000 | 350 | 3.399.870.000 | 350 | 4.827.820.000 | 350 | 4.827.820.000 |  |  |
| 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   |   |     |     | 466.030.850   |     | 716.030.850   |     | 716.030.850   |     | 966.030.850   |     | 966.030.850   |  |  |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman   | Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar (%)   | 0   | 20  | 466.030.850   | 30  | 716.030.850   | 40  | 716.030.850   | 50  | 966.030.850   | 60  | 966.030.850   | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |  |
|   | Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persvaratan perizinan (%)   | 0   | 100 |               | 100 |               | 100 |               | 100 |               | 100 |               |  |  |
|   | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan  | 0   | 76  |               | 77  |               | 78  |               | 78  |               | 80  |               |  |  |

|  |   |   |    |  |      |  |    |  |      |  |    |  |  |
|--|---|---|----|--|------|--|----|--|------|--|----|--|--|
|  | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (%) | 0 | 84 |  | 84,5 |  | 85 |  | 85,5 |  | 86 |  |  |
|  | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)  | 0 | 26 |  | 28   |  | 30 |  | 32   |  | 34 |  |  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT  | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT   | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |             |            |             |            |             |            |             |            |             | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|------------|
|   |   |                           | 2026                            |             | 2027       |             | 2028       |             | 2029       |             | 2030       |             |                     |            |
|   |   |                           | TARGE<br>T                      | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        | TARGE<br>T | PAGU        |                     |            |
| (01)  | (02)  | (03)                      | (04)                            | (05)        | (06)       | (07)        | (08)       | (09)        | (10)       | (11)        | (12)       | (13)        | (14)                | (15)       |
| 1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   |   |                           |                                 | 104.039.600 |            | 134.039.600 |            | 134.039.600 |            | 214.039.600 |            | 214.039.600 |                     |            |
| Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                            | 60                        | 70                              | 104.039.600 | 70         | 134.039.600 | 70         | 134.039.600 | 70         | 214.039.600 | 70         | 214.039.600 |                     |            |
| 1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  |   |                           |                                 | 104.039.600 |            | 134.039.600 |            | 134.039.600 |            | 214.039.600 |            | 214.039.600 |                     |            |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                            | 60                        | 70                              | 104.039.600 | 70         | 134.039.600 | 70         | 134.039.600 | 70         | 214.039.600 | 70         | 214.039.600 |                     |            |
| 1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri   |   |                           |                                 | 107.597.000 |            | 137.597.000 |            | 137.597.000 |            | 155.900.725 |            | 155.900.725 |                     |            |
| Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu | 50                        | 50                              | 107.597.000 | 50         | 137.597.000 | 70         | 137.597.000 | 70         | 155.900.725 | 80         | 155.900.725 |                     |            |
| 1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |   |                           |                                 | 107.597.000 |            | 137.597.000 |            | 137.597.000 |            | 155.900.725 |            | 155.900.725 |                     |            |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga       | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu | 50                        | 50                              | 107.597.000 | 50         | 137.597.000 | 70         | 137.597.000 | 70         | 155.900.725 | 80         | 155.900.725 |                     |            |
| 1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air   |   |                           |                                 | 83.444.250  |            | 114.000.000 |            | 114.000.000 |            | 175.900.725 |            | 175.900.725 |                     |            |

|   |   |    |    |             |    |             |    |             |    |               |    |               |  |  |
|---|---|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------|----|---------------|--|--|
| Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, | 1  | 1  | 83.444.250  | 1  | 114.000.000 | 1  | 114.000.000 | 1  | 175.900.725   | 1  | 175.900.725   |  |  |
| 1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |   |    |    | 83.444.250  |    | 114.000.000 |    | 114.000.000 |    | 175.900.725   |    | 175.900.725   |  |  |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)       | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, | 1  | 1  | 83.444.250  | 1  | 114.000.000 | 1  | 114.000.000 | 1  | 175.900.725   | 1  | 175.900.725   |  |  |
| 1.02.04.2.05 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  |   |    |    | 75.950.000  |    | 110.204.450 |    | 110.204.450 |    | 100.000.000   |    | 100.000.000   |  |  |
| Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)                          | 1  | 1  | 75.950.000  | 1  | 110.204.450 | 1  | 110.204.450 | 1  | 100.000.000   | 1  | 100.000.000   |  |  |
| 1.02.04.2.05.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   |   |    |    | 75.950.000  |    | 110.204.450 |    | 110.204.450 |    | 100.000.000   |    | 100.000.000   |  |  |
| Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)                          | 1  | 1  | 75.950.000  | 1  | 110.204.450 | 1  | 110.204.450 | 1  | 100.000.000   | 1  | 100.000.000   |  |  |
| 1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri  |   |    |    | 95.000.000  |    | 220.189.800 |    | 220.189.800 |    | 320.189.800   |    | 320.189.800   |  |  |
| Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                        | 60 | 60 | 95.000.000  | 60 | 220.189.800 | 60 | 220.189.800 | 60 | 320.189.800   | 60 | 320.189.800   |  |  |
| 1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan  |   |    |    | 95.000.000  |    | 220.189.800 |    | 220.189.800 |    | 320.189.800   |    | 320.189.800   |  |  |
| Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan   | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                        | 60 | 60 | 95.000.000  | 60 | 220.189.800 | 60 | 220.189.800 | 60 | 320.189.800   | 60 | 320.189.800   |  |  |
| 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   |   |    |    | 562.904.000 |    | 669.194.100 |    | 875.798.699 |    | 1.082.733.531 |    | 1.090.015.106 |  |  |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan  | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)   | 35 | 37 | 437.102.000 | 38 | 537.102.000 | 39 | 737.102.000 | 40 | 937.102.000   | 41 | 937.102.000   | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan |  |
| 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tinokat Daerah   |   |    |    | 215.218.500 |    | 315.218.500 |    | 365.218.500 |    | 465.218.500   |    | 465.218.500   |  |  |

|  |   |   |   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |  |  |
|--|---|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|
| Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi | 1 | 1 | 215.218.500 | 1 | 315.218.500 | 1 | 365.218.500 | 1 | 465.218.500 | 1 | 465.218.500 |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)                                   | 8 | 4 |             | 4 |             | 4 |             | 4 |             | 4 |             |  |  |
| 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                             |   |   |   | 115.218.500 |   | 215.218.500 |   | 265.218.500 |   | 365.218.500 |   | 365.218.500 |  |  |
| Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)                                   | 8 | 4 | 115.218.500 | 4 | 215.218.500 | 4 | 265.218.500 | 4 | 365.218.500 | 4 | 365.218.500 |  |  |
| 1.02.05.2.01.0002 - Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman    |   |   |   | 100.000.000 |   | 100.000.000 |   | 100.000.000 |   | 100.000.000 |   | 100.000.000 |  |  |
| Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman            | Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi | 1 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |  |  |
| 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       |   |   |   | 101.333.500 |   | 101.333.500 |   | 176.333.500 |   | 226.333.500 |   | 226.333.500 |  |  |
| Terlaksananya kegiatan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)                           | 2 | 3 | 101.333.500 | 3 | 101.333.500 | 3 | 176.333.500 | 3 | 226.333.500 | 3 | 226.333.500 |  |  |
| 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup  |   |   |   | 101.333.500 |   | 101.333.500 |   | 176.333.500 |   | 226.333.500 |   | 226.333.500 |  |  |
| Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)                           | 2 | 3 | 101.333.500 | 3 | 101.333.500 | 3 | 176.333.500 | 3 | 226.333.500 | 3 | 226.333.500 |  |  |
| 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah                          |   |   |   | 120.550.000 |   | 120.550.000 |   | 195.550.000 |   | 245.550.000 |   | 245.550.000 |  |  |
| Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota           | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Dava Masyarakat                                 | 1 | 1 | 120.550.000 | 1 | 120.550.000 | 1 | 195.550.000 | 1 | 245.550.000 | 1 | 245.550.000 |  |  |
| 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya                       |   |   |   | 120.550.000 |   | 120.550.000 |   | 195.550.000 |   | 245.550.000 |   | 245.550.000 |  |  |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Dava Masyarakat                                 | 1 | 1 | 120.550.000 | 1 | 120.550.000 | 1 | 195.550.000 | 1 | 245.550.000 | 1 | 245.550.000 |  |  |

#### **4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah**

Uraian sub kegiatan untuk mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah penjabaran kegiatan lebih detail yang mendukung program prioritas, yang disusun dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra dapat dilihat di Tabel 4.4

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

| NO  | PROGRAM PRIORITAS   | OUTCOME   | KEGIATAN / SUBKEGIATAN  | KETERANGAN |
|---|---|---|---|------------|
| (01)  | (02)  | (03)  | (04)  | (05)       |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan</b> |   |   |   |            |
| 1.  | 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan | 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota<br>1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya<br>1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil<br>1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin<br>1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir<br>1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita<br>1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar<br>1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif<br>1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut<br>1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi<br>1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus<br>1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat<br>1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis<br>1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV<br>1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan<br>1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan<br>1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas<br>1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya<br>1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak<br>1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi<br>1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan<br>1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota<br>1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan |            |
| 2.  | 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan                         | 1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota<br>1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan<br>1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  |            |

| NO   | PROGRAM PRIORITAS  | OUTCOME  | KEGIATAN / SUBKEGIATAN   | KETERANGAN |
|------|--|--|--|------------|
| (01) | (02)   | (03)   | (04)   | (05)       |
|      |  |  | 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar   |            |
|      |  |  | 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |            |
|      |  |  | 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |            |
| 3.   | 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Dinas Kesehatan | 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |            |
|      |  |  | 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                             |            |
|      |  |  | 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       |            |
|      |  |  | 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat   |            |
|      |  |  | 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |            |
|      |  |  | 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)     |            |



#### **4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan**

Target keberhasilan Renstra Dinas Kesehatan 2025–2029 dicapai melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan IKU yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART). IKU ini mencerminkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan, seperti meningkatkan umur harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan ibu, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yang semuanya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dapat dilihat di Tabel 4.5

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**

| NO   | INDIKATOR   | SATUAN                        | BASELINE<br>TAHUN 2024 | TARGET TAHUN    |                 |                 |                 |                 |                 | KETERANGAN |
|------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
|      |   |                               |                        | 2025            | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            |            |
| (01) | (02)  | (03)                          | (04)                   | (05)            | (06)            | (07)            | (08)            | (09)            | (10)            | (11)       |
|      | 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |                               |                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |            |
| 1.   | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)                                | (%)                           | 98,35                  | 98,5            | 98,76           | 98,88           | 98,92           | 99              | 99              |            |
| 2.   | Angka Kematian Ibu (AKI)  | (per 100.000 kelahiran hidup) | 231,9                  | 189,41 - 199,81 | 187,41 - 198,81 | 185,41 - 197,81 | 183,41 - 196,81 | 181,41 - 195,81 | 179,41 - 194,81 |            |
| 3.   | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                              | Persentase                    | 33                     | 35              | 37              | 39              | 40              | 41              | 43              |            |
| 4.   | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup                                      | %                             | 0                      | 65              | 66              | 67              | 68              | 69              | 70              |            |
| 5.   | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Indeks                        | 83,5                   | 83,75           | 83,9            | 84,05           | 84,2            | 84,35           | 84,5            |            |
| 6.   | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman              | Persentase                    | 74                     | 75              | 76              | 77              | 78              | 79              | 80              |            |
| 7.   | Nilai SAKIP   | Angka                         | 82,57                  | 82,96           | 83,35           | 83,74           | 84,13           | 84,52           | 84,91           |            |
| 8.   | Angka Kematian Balita   | Per 100.000 Kelahiran Hidup   | 15,28                  | 15,25           | 14,75           | 14,5            | 14,25           | 14              | 13,75           |            |
| 9.   | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita                          | (%)                           | 11,2                   | 10              | 8               | 7               | 6               | 5               | 5               |            |
| 10.  | Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis                                     | Persentase                    | 100                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |            |
| 11.  | Cakupan imunisasi bayi lengkap  | Persentase                    | 80,6                   | 80              | 82              | 83              | 84              | 85              | 85              |            |
| 12.  | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)                 | (%)                           | 86,65                  | 85              | 85              | 85              | 90              | 90              | 90              |            |
| 13.  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | %                             | 100                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |            |
| 14.  | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna                                      | %                             | 100                    | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |            |
| 15.  | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna  | %                             | 96                     | 96              | 96              | 96              | 100             | 100             | 100             |            |

**4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).**

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk periode 2025–2029 dirumuskan melalui Sasaran RPJMD yang dipecah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK ini menggambarkan pencapaian target dari urusan pemerintahan spesifik untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Penyusunan ini melibatkan analisis data pembangunan lima tahun terakhir dan diselaraskan dengan RPJMN serta Rancangan Teknokratik RPJMD untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terkoordinasi. Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat di Tabel 4.6.

**Tabel Indikator Kunci (IKK)**

| No | Indikator Kinerja Kunci  | Target |      |      |      |       | Realisasi |       |       |       |       | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |      |      |      |      |
|----|--|--------|------|------|------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
|    |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024  | 2020      | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2020                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | 2  | 3      | 4    | 5    | 6    | 7     | 8         | 9     | 10    | 11    | 12    | 13                           | 14   | 15   | 16   | 17   |
| 1  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 94,86 | 99,22 | 100   | 97,5  | 100%                         | 95%  | 99%  | 100% | 98%  |
| 2  | Cakupan penemuan kasus TB  | 80     | 80   | 90   | 90   | 90    | 52,4      | 60,4  | 78,2  | 94,5  | 74,4  | 66%                          | 76%  | 87%  | 105% | 83%  |
| 3  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 95,09     | 95,56 | 100   | 100   | 95,58 | 95%                          | 96%  | 100% | 100% | 96%  |
| 4  | Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan                | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                 | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 91,93     | 95,88 | 96,22 | 94,53 | 75,35 | 92%                          | 96%  | 96%  | 95%  | 75%  |
| 6  | Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat                               | 0      | 0    | 0    | 0    | 0,009 | 0         | 0     | 0     | 0     | 0,009 | 0%                           | 0%   | 0%   | 0%   | 100% |
| 7  | Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8  | Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional | 0      | 0    | 0    | 100  | 100   | 0         | 0     | 0     | 40    | 100   | 0%                           | 0%   | 0%   | 40%  | 100% |
| 9  | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar        | 0      | 0    | 100  | 100  | 100   | 0         | 0     | 65,3  | 68,72 | 68,2  | 0%                           | 0%   | 65%  | 69%  | 68%  |
| 10 | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar                                    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0%                           | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 11 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 99,12     | 100   | 100   | 99,36 | 77,08 | 99%                          | 100% | 100% | 99%  | 77%  |
| 12 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                             | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 85,86     | 87,69 | 84,86 | 82,06 | 62,56 | 86%                          | 88%  | 85%  | 82%  | 63%  |
| 13 | Persentase Laporan Keuangan yang disusun   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan                                   | 100    | 100  | 100  | 100  | 100   | 44,81     | 44,69 | 46,96 | 47,45 | 47,8  | 45%                          | 45%  | 47%  | 47%  | 48%  |

|    |   |     |     |     |     |     |       |       |       |      |     |      |      |      |      |      |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
| 15 | Persentase merokok penduduk 10-21 tahun   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 16 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,64 | 100   | 100   | 100  | 100 | 98%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar                                       | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,51 | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63,57 | 61,22 | 100   | 100  | 100 | 64%  | 61%  | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63,57 | 61,22 | 100   | 100  | 100 | 64%  | 61%  | 100% | 100% | 100% |
| 20 | Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu  | 67  | 69  | 71  | 73  | 75  | 61    | 63    | 65    | 66   | 69  | 91%  | 91%  | 92%  | 90%  | 92%  |
| 21 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86,6  | 88,33 | 100   | 100  | 100 | 87%  | 88%  | 100% | 100% | 100% |
| 22 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15,22 | 16,53 | 19,66 | 83,8 | 100 | 15%  | 17%  | 20%  | 84%  | 100% |
| 23 | Persentase penerbitan dan pemenuan komitmen SPP - IRT sesuai standar  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 24 | Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar   | 80  | 80  | 82  | 82  | 85  | 80    | 80    | 82    | 85   | 85  | 100% | 100% | 100% | 104% | 100% |
| 25 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 27 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 100   | 100   | 100  | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|    |   |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 29 | Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)                                  | 0   | 0   | 100 | 100 | 100   | 0     | 0     | 72,19 | 76,45 | 76,55 | 0%   | 0%   | 72%  | 76%  | 77%  |
| 30 | Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan  | 82  | 84  | 83  | 86  | 100   | 81,32 | 91,75 | 72,5  | 83,33 | 58    | 99%  | 109% | 87%  | 97%  | 58%  |
| 31 | Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15    | 21,01 | 22,09 | 23,19 | 24,29 | 25,39 | 191% | 184% | 178% | 174% | 169% |
| 32 | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100   | 36,04 | 32,71 | 65,9  | 71,25 | 82,38 | 36%  | 33%  | 66%  | 71%  | 82%  |
| 33 | Presentase lanjut usia yang mandiri   | 0   | 0   | 0   | 50  | 50    | 0     | 0     | 0     | 14,4  | 19,6  | 0%   | 0%   | 0%   | 29%  | 39%  |
| 34 | Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 35 | Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun   | 0   | 0   | 0   | 0   | 23,4  | 0     | 0     | 0     | 0     | 85    | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 363% |
| 36 | Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan  | 0   | 0   | 0   | 0   | 76,61 | 0     | 0     | 0     | 0     | 100   | 0%   | 0%   | 0%   | 0%   | 131% |

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rencana Strategis (Renstra) ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana tahunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun, mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2029. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dinamika lingkungan strategis.

Disadari bahwa penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat keterbatasan, baik dari aspek data, analisis, maupun prediksi kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya terdapat perkembangan atau perubahan yang signifikan sebagai hasil evaluasi internal maupun eksternal, maka reviu terhadap Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) ini sangat bergantung pada komitmen, partisipasi aktif, dedikasi, dan kerja keras seluruh karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso baik dalam bentuk kebijakan, administrasi, teknis, maupun politis. Rencana strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal, untuk itu perlu masukan dan saran-saran untuk rencana perbaikan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga dokumen ini menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong

peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso secara berkelanjutan.

Bondowoso, 19 September 2025

TIM PENYUSUN



## LAMPIRAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULARIUM  
INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
DALAM RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2025 - 2029

| NO | Tujuan/Sasaran/Kegiatan/Subkegiatan                                       | Outcome Program/Output Kegiatan/Output Subkegiatan | Indikator  | Definisi Operasional   | Formularium   | Penanggung Jawab | Keterangan                    |
|----|---|--|--|--|---|------------------|-------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7                | 8                             |
|    | Tujuan  |  |  |  |   |                  |                               |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan                                 |  | Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ((%)) | Semua penduduk Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, yang terdaftar dan terakomodasi dalam program JKN melalui BPJS Kesehatan, yang tujuannya memastikan setiap orang mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan | Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.<br>Persentase cakupan kepesertaan JKN = (Jumlah Peserta JKN/ Jumlah Penduduk) * 100% | Kepala Dinkes    | -                             |
|    | Sasaran 1   |  |  |  |   |                  |                               |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Perangkat Daerah |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)                        | Nilai yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Dihitung berdasarkan hasil survei masyarakat pengguna layanan dengan instrumen baku sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017  | Hasil Survey Kerjasama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso   | Kepala Dinkes    | -                             |
|    |   |  | Nilai SAKIP (Angka)  | Skor akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan, sesuai pedoman PermenPANRB No. 88 Tahun 2021   | Skor komposit berdasarkan bobot 30% perencanaan, 25% pengukuran, 15% pelaporan, 10% evaluasi internal, 20% capaian. Dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso                   | Kepala Dinkes    | IKU (Indikator Kinerja Utama) |

|   |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 2 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat |  | Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) | Banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan komplikasi obstetrik atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.                       | Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. | Kepala Bidang Kesmas, P2, Yankes dan SDK |  |
|   |   |  | Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)      | Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi) Nilai normatif AKBa adalah sebagai berikut :<br>- $\geq 140$ = sangat tinggi<br>- $71 < \text{AKBa} < 140$ = tinggi<br>- $20 < \text{AKBa} < 70$ = sedang<br>- $\leq 20$ = rendah | Jumlah penduduk yang meninggal pada umur 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk usia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada pertengahan tahun yang sama dan dikali 1000                        |  |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))          | Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks panjang badan/tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U). Data panjang badan/tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi, di mana panjang badan digunakan untuk anak berusia 0-2 tahun dan tinggi badan digunakan untuk anak usia 2-5 tahun. Panjang badan/tinggi badan menjadi | Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = (JAB(5)P \text{ stunting} / JAB(5)) \text{ dikali } 100\%$ |  |  |
|  |  |  | Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)              | Proporsi kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target  | Jumlah kabupaten/kota dengan capaian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis pada >80% populasi target, dibagi total kabupaten/kota, lalu dikalikan 100   |  |  |
|  |  |  | Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)                               | Persentase bayi (0-11 bulan) yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.   | Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dibagi target bayi (0-11 bulan) dalam waktu yang sama dikali 100  |  |  |
|  |  |  | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%)) | Jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun.  | Jumlah semua kasus TBC diobati yang memiliki hasil akhir pengobatan sembuh dan pengobatan lengkap diantara Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dikali 100   |  |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) | Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup (diet seimbang, istirahat yang cukup, aktivitas fisik, dan kelola stress) 3) Pengelolaan farmakologis Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg | Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, dibagi jumlah total penderita hipertensi, dikali 100  |  |  |
|  |  |  | Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)  | Persentase Puskesmas yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi puskesmas dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029. Unit populasi: Puskesmas teregistrasi yang paling lambat operasional di tahun 2026 Unit populasi: Puskesmas teregistrasi yang paling   | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total populasi puskesmas yang telah teregistrasi dikali 100   |  |  |
|  |  |  | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)                                      | Persentase Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang telah melaksanakan akreditasi dengan status capaian minimal sertifikat paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029.  | Jumlah Rumah Sakit pemerintah (K/L, TNI/Polri, dan daerah) yang mendapatkan sertifikat akreditasi paripurna dan masih berlaku dalam kurun 2025-2029 dibagi total populasi RS Pemerintah (RS yang memiliki izin operasional maksimal tahun 2027) dikali 100 |  |  |

|   |   |   |   |  |   |                      |   |
|---|---|---|---|--|---|----------------------|---|
| 3 | Meningkatnya ketersediaan dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar |   | Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase) | Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan, distribusi, serta pengawasan terhadap produk farmasi, alat kesehatan, dan pangan yang memenuhi standar di suatu wilayah dalam |   | Kepala Bidang SDK    |   |
| 4 | Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan  |   | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)                 | Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pertumbuhan atau peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas tenaga kesehatan dalam periode tertentu.   | Persentase Peningkatan Kompetensi = Jumlah SDM yang mengalami peningkatan kompetensi dibagi total SDM yang dievaluasi dikali 100%   | Kepala Bidang SDK    |   |
| 5 | Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat   |   | Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)                                  | Persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama  | Jumlah penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama dalam suatu wilayah dibagi jumlah penduduk >10 tahun dikali 100 | Kepala Bidang Kesmas |   |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik dan Efisien Dinas Kesehatan | Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi yang disusun                            | Persentase jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi yang telah disusun oleh perangkat daerah dibandingkan dengan jumlah dokumen wajib disusun   | $\Sigma$ dokumen perencanaan dan evaluasi yang telah di susun -----<br>X100%<br>$\Sigma$ dokumen perencanaan dan evaluasi yang wajib disusun  | Sekretaris Dinkes    | - |

|       |   |   |  |  |  |                     |   |
|-------|---|---|--|--|--|---------------------|---|
|       |   |   | Persentase Laporan keuangan yang disusun   | Persentase jumlah laporan keuangan yang telah disusun oleh perangkat daerah sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan yang wajib disusun setiap tahun anggaran. | $\frac{\Sigma \text{ laporan keuangan yang telah disusun}}{100\% \Sigma \text{ laporan keuangan yang wajib disusun}} \times$   | Sekretaris Dinkes   | - |
|       |   |   | Persentase Sarana dan Prasarana aparatur yang layak fungsi                                   | Ketersediaan jenis sarana dan prasarana sesuai hasil perhitungan pada Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kemenkes RI.  | $\frac{\Sigma \text{ sarana dan prasarana yang layak fungsi}}{\Sigma \text{ sarana dan prasarana yang tersedia}} \times 100\%$ | Sekretaris Dinkes   | - |
| 1,1   | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | Jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | Banyaknya dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun   | $\Sigma$ dokumen perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun                                  | Perencana Ahli Muda | - |
| 1.1.1 | Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah  | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | Banyaknya dokumen perencanaan perangkat daerah   | $\Sigma$ dokumen perencanaan perangkat daerah  | Perencana Ahli Muda | - |
| 1.1.2 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Tersedianya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD  | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD  | Banyaknya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD   | $\Sigma$ koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD  | Perencana Ahli Muda | - |
| 1.1.3 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Tersedianya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD                                  | Banyaknya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD   | $\Sigma$ koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD  | Perencana Ahli Muda | - |
| 1.1.4 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Tersedianya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD  | Jumlah koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD  | Banyaknya koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD   | $\Sigma$ koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD  | Perencana Ahli Muda | - |
| 1.1.5 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Tersedianya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD  | Jumlah koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD  | Banyaknya koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD   | $\Sigma$ koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD  | Perencana Ahli Muda | - |
| 1.1.6 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Banyaknya koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  | $\Sigma$ koordinasi dan penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                 | Perencana Ahli Muda | - |
| 1.1.7 | Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Tersedianya evaluasi kinerja perangkat daerah   | Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah   | Banyaknya evaluasi kinerja perangkat daerah  | $\Sigma$ evaluasi kinerja perangkat daerah   | Perencana Ahli Muda | - |

|       |   |   |  |   |  |                           |   |
|-------|---|---|--|---|--|---------------------------|---|
| 1.1.8 | Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah  | Tersedianya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah  | Jumlah pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah  | Banyaknya pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah  | $\Sigma$ pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah  | Perencana Ahli Muda       | - |
| 1.1.9 | Subkegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Banyaknya pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | $\Sigma$ pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Perencana Ahli Muda       | - |
| 1.2   | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan                       | Jumlah gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan                       | Banyaknya gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan                       | $\Sigma$ gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan dan verifikasi keuangan, serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan                       | Subkoor Keuangan dan Aset | - |
| 1.2.1 | Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Tersedianya penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | Banyaknya penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | $\Sigma$ penyediaan gaji dan tunjangan ASN   | Subkoor Keuangan dan Aset | - |
| 1.2.2 | Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Tersedianya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  | Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  | Banyaknya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  | $\Sigma$ pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  | Subkoor Keuangan dan Aset | - |
| 1.2.3 | Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | Tersedianya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD   | Jumlah koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD   | Banyaknya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD   | $\Sigma$ koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD   | Subkoor Keuangan dan Aset | - |
| 1.2.4 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD   | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD   | Banyaknya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD   | $\Sigma$ koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD   | Subkoor Keuangan dan Aset | - |
| 1.2.5 | Subkegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | Tersedianya pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan  | Jumlah pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan  | Banyaknya pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan  | $\Sigma$ pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan  | Subkoor Keuangan dan Aset | - |
| 1.2.6 | Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   | Tersedianya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD   | Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD   | Banyaknya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD   | $\Sigma$ koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD   | Subkoor Keuangan dan Aset | - |
| 1.2.7 | Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | Tersedianya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran  | Jumlah penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran  | Banyaknya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran  | $\Sigma$ penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran  | Subkoor Keuangan dan Aset | - |

|       |   |  |  |   |   |            |   |
|-------|---|--|--|---|---|------------|---|
| 1,3   | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Tersedianya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya  | Jumlah alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya   | Banyaknya alat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya   | Σalat/bahan, perlengkapan, dan kebutuhan administrasi kantor lainnya  | Kasubag UP | - |
| 1.3.1 | Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi   | Tersedianya penyediaan komponen instalasi  | Jumlah penyediaan komponen instalasi   | Banyaknya penyediaan komponen instalasi   | Σpenyediaan komponen instalasi  | Kasubag UP | - |
| 1.3.2 | Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Banyaknya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  | Σpenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor   | Kasubag UP | - |
| 1.3.3 | Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | Banyaknya penyediaan barang cetakan dan penggandaan   | Σpenyediaan barang cetakan dan penggandaan  | Kasubag UP | - |
| 1.3.4 | Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   | Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD  | Σpenyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD   | Kasubag UP | - |
| 1,4   | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Tersedianya barang sesuai kebutuhan perangkat daerah   | Jumlah barang sesuai kebutuhan perangkat daerah  | Banyaknya barang sesuai kebutuhan perangkat daerah  | Σbarang sesuai kebutuhan perangkat daerah   | Kasubag UP | - |
| 1.4.1 | Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Tersedianya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan  | Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan   | Banyaknya pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan   | Σ pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan   | Kasubag UP | - |
| 1,5   | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Banyaknya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Σkebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | Kasubag UP | - |
| 1.5.1 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Banyaknya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Σpenyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | Kasubag UP | - |
| 1.5.2 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor  | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Banyaknya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Σ penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   | Kasubag UP | - |
| 1,6   | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | Banyaknya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | Σ barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | Kasubag UP | - |
| 1.6.1 | Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Banyaknya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Σ penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Kasubag UP | - |
|       |   |  |  |   |   |            |   |



|       |  |  |   |  |   |  |  |
|-------|--|--|---|--|---|--|--|
| 2     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat  | Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Dinas Kesehatan  |   |  |   | Kepala Bidang P2, Kesmas, Yankes dan SDK |  |
| 2,1   | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       | Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota                                 | Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota                               | Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota                               | $\Sigma$ fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota                               | Kepala Bidang P2, Kesmas, Yankes dan SDK |  |
| 2.1.1 | Subkegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya  | Terpenuhinya pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya   | Jumlah pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya  | Banyaknya pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya  | $\Sigma$ pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya  | Kepala Bidang SDK                        |  |
| 2.1.2 | Subkegiatan Pengembangan Puskesmas   | Terpenuhinya pengembangan puskesmas  | Jumlah pengembangan puskesmas   | Banyaknya pengembangan puskesmas   | $\Sigma$ pengembangan puskesmas   | Subkoord Alkes dan PKRT                  |  |
| 2.1.3 | Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  | Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas  | Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas  | Banyaknya rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas  | $\Sigma$ rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas  | Subkoord Alkes dan PKRT                  |  |
| 2.1.4 | Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    | Terlaksananya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan                                    | Jumlah pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan                                    | Banyaknya pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan                                    | $\Sigma$ pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan                                    | Subkoord Alkes dan PKRT                  |  |
| 2.1.5 | Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  | Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi  | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi  | Banyaknya pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi  | $\Sigma$ pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi  | Subkoord Alkes dan PKRT                  |  |
| 2.1.6 | Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan               | Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan               | Jumlah pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan               | Banyaknya pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan               | $\Sigma$ pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan               | Subkoord Alkes dan PKRT                  |  |
| 2.1.7 | Subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan | Jumlah pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan | Banyaknya pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan | $\Sigma$ pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan | Subkoord Kefarmasian                     |  |
| 2.1.8 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  | Terpenuhinya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga  | Subkoord Yankes Primer                   |  |

|        |   |   |  |   |  |                         |  |
|--------|---|---|--|---|--|-------------------------|--|
| 2.1.9  | Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Terlaksananya distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan | Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan | Banyaknya distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan | $\Sigma$ distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan | Subkoord Kefarmasian    |  |
| 2.2    | Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota   | Jumlah pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota   | Banyaknya pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota   | $\Sigma$ pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota   | Subkoord Yankes Rujukan |  |
| 2.2.1  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil   | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil   | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil   | Subkoord KGM            |  |
| 2.2.2  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin  | Subkoord KGM            |  |
| 2.2.3  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir   | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir   | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir   | Subkoord KGM            |  |
| 2.2.4  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan balita  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan balita  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan balita  | Subkoord KGM            |  |
| 2.2.5  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar  | Subkoord KGM            |  |
| 2.2.6  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif   | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif   | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif   | Subkoord KGM            |  |
| 2.2.7  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut  | Subkoord KGM            |  |
| 2.2.8  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi  | Subkoor PTM             |  |
| 2.2.9  | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus  | Subkoor PTM             |  |
| 2.2.10 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat  | Subkoor PTM             |  |

|        |  |  |   |  |   |                             |  |
|--------|--|--|---|--|---|-----------------------------|--|
| 2.2.11 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                       | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                       | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                       | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                       | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis                                       | Subkoord P2PM               |  |
| 2.2.12 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                               | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV                               | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV                               | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV                               | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV                               | Subkoord P2PM               |  |
| 2.2.13 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | Subkoord Survim             |  |
| 2.2.14 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat  | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat  | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat  | Subkoord KGM                |  |
| 2.2.15 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga   | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga   | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga   | Subkoor Kesting dan Kesjaor |  |
| 2.2.16 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan   | Subkoor Kesting dan Kesjaor |  |
| 2.2.17 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | Terlaksananya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan  | Jumlah pengelolaan pelayanan promosi kesehatan  | Banyaknya pengelolaan pelayanan promosi kesehatan  | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan promosi kesehatan  | Subkoord Promkes            |  |
| 2.2.18 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya | Subkoord Kestrad            |  |
| 2.2.19 | Subkegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | Terlaksananya pengelolaan surveilans kesehatan   | Jumlah pengelolaan surveilans kesehatan   | Banyaknya pengelolaan surveilans kesehatan   | $\Sigma$ pengelolaan surveilans kesehatan   | Subkoord Survim             |  |
| 2.2.20 | Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA   | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA   | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA   | Subkoord PTM                |  |
| 2.2.21 | Subkegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                 | Terlaksananya pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan                 | Jumlah pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan                 | Banyaknya pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan                 | $\Sigma$ pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan                 | Subkoord Yankes Rujukan     |  |
| 2.2.22 | Subkegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular   | Jumlah pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular   | Banyaknya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular   | $\Sigma$ pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular   | Subkoord P2PM               |  |

|        |   |   |  |   |  |                              |  |
|--------|---|---|--|---|--|------------------------------|--|
| 2.2.23 | Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat  | Jumlah pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat  | Banyaknya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat  | $\Sigma$ pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat  | Subkoord Yankes Primer       |  |
| 2.2.24 | Subkegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional   | Terlaksananya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional   | Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional   | Banyaknya pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional   | $\Sigma$ pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional   | Subkoord Survim              |  |
| 2.2.25 | Subkegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | Terlaksananya penyelenggaraan kabupaten/kota sehat  | Jumlah penyelenggaraan kabupaten/kota sehat  | Banyaknya penyelenggaraan kabupaten/kota sehat  | $\Sigma$ penyelenggaraan kabupaten/kota sehat  | Subkoord Kesling dan Kesjaor |  |
| 2.2.26 | Subkegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas   | Terlaksananya operasional pelayanan puskesmas   | Jumlah operasional pelayanan puskesmas   | Banyaknya operasional pelayanan puskesmas   | $\Sigma$ operasional pelayanan puskesmas   | Subkoord Yankes Primer       |  |
| 2.2.27 | Subkegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | Terlaksananya operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya   | Jumlah operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya   | Banyaknya operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya   | $\Sigma$ operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya   | Subkoord Yankes Primer       |  |
| 2.2.28 | Subkegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah   | Terlaksananya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah   | Jumlah pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah   | Banyaknya pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah   | $\Sigma$ pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah   | Subkoord Survim              |  |
| 2.2.29 | Subkegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | Jumlah pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | Banyaknya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | $\Sigma$ pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | Subkoord P2PM                |  |
| 2.2.30 | Subkegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | Terlaksananya pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | Jumlah pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | Banyaknya pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | $\Sigma$ pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | Subkoord KGM                 |  |
| 2,3    | Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | Terkelolanya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi   | Jumlah sistem informasi kesehatan secara terintegrasi  | Banyaknya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi  | $\Sigma$ sistem informasi kesehatan secara terintegrasi  | Subkoord PPEP                |  |
| 2.3.1  | Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kesehatan  | Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan  | Banyaknya pengelolaan sistem informasi kesehatan  | $\Sigma$ pengelolaan sistem informasi kesehatan  | Subkoord PPEP                |  |
| 2,4    | Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | Terlaksananya pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota                                 | Jumlah pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota                                 | Banyaknya pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota                                 | $\Sigma$ pemberian izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota                                 | Subkoord Yankes Primer       |  |
| 2.4.1  | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya | Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya | Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya | $\Sigma$ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya | Subkoord Yankes Primer       |  |

|       |  |  |   |  |  |                        |  |
|-------|--|--|---|--|--|------------------------|--|
| 2.4.2 | Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   | Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan   | Jumlah peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan   | Banyaknya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan   | Σ peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan   | Subkoord Yankes Primer |  |
| 3     | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman  | Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi. alat kesehatan. dan makanan minuman  |   |  |  | Kepala Bidang SDK      |  |
| 3,1   | Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Terlaksananya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)   | Jumlah pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)   | Banyaknya pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)   | Σ pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)   | Subkoor Kefarmasian    |  |
| 3.1.1 | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)  | Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)  | Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)  | Σ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)  | Subkoor Kefarmasian    |  |
| 3,2   | Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga   | Terlaksananya penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga  | Jumlah penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga  | Banyaknya penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah   | Σ penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga  | Subkoor Kefarmasian    |  |
| 3.2.1 | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah | Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah | Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah | Σ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah | Subkoor Kefarmasian    |  |

|       |   |  |   |  |   |                     |  |
|-------|---|--|---|--|---|---------------------|--|
| 3,3   | Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)   | Terlaksananya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)   | Jumlah penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)   | Banyaknya penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)   | $\Sigma$ penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)   | Subkoor Kefarmasian |  |
| 3.3.1 | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) | Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) | Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) | $\Sigma$ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) | Subkoor Kefarmasian |  |
| 3,4   | Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan  | Terlaksananya penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Jumlah penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Banyaknya penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | $\Sigma$ penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Subkoor Kefarmasian |  |
| 3.4.1 | Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | Terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Jumlah pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Banyaknya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | $\Sigma$ pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Subkoor Kefarmasian |  |
| 3,5   | Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan  | Terlaksananya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga   | Jumlah pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga   | Banyaknya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga   | $\Sigma$ pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga   | Subkoor Kefarmasian |  |
| 3.5.1 | Subkegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan  | Terlaksananya pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan   | Jumlah pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan   | Banyaknya pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan   | $\Sigma$ pemeriksaan post Market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan   | Subkoor Kefarmasian |  |
|       |   |  |   |  |   |                     |  |

|       |   |  |   |  |   |                   |  |
|-------|---|--|---|--|---|-------------------|--|
| 4     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan  | Jumlah mutu dan distribusi tenaga kesehatan   | Banyaknya mutu dan distribusi tenaga kesehatan   | $\Sigma$ mutu dan distribusi tenaga kesehatan   | Kepala Bidang SDK |  |
| 4,1   | Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota  | Jumlah pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota  | Banyaknya pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota  | $\Sigma$ pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota  | Subkoord SDMK     |  |
| 4.1.1 | Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan                 | Jumlah pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan                 | Banyaknya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan                 | $\Sigma$ pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan                 | Subkoord SDMK     |  |
| 4,2   | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  | Terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota | Jumlah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota | Banyaknya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota | $\Sigma$ perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota | Subkoord SDMK     |  |
| 4.2.1 | Subkegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                       | Terlaksananya perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan  | Jumlah perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan  | Banyaknya perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan  | $\Sigma$ perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan  | Subkoord SDMK     |  |
| 4,2,2 | Subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar   | Jumlah pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar   | Banyaknya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar   | $\Sigma$ pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar   | Subkoord SDMK     |  |
| 4.2.3 | Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan   | Jumlah pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan   | Banyaknya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan   | $\Sigma$ pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan   |                   |  |
| 4,3   | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    | Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | Jumlah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | Banyaknya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | $\Sigma$ pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | Subkoord SDMK     |  |
| 4.3.1 | Subkegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | Jumlah pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | Banyaknya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | $\Sigma$ pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota  | Subkoord SDMK     |  |
|       |   |  |   |  |   |                   |  |

|       |   |   |  |   |   |                                    |  |
|-------|---|---|--|---|---|------------------------------------|--|
| 5     | Program Pem<br>berdayaan<br>Masyarakat Bidang<br>Kesehatan  | Meningkatnya kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat bidang<br>kesehatan Dinas<br>Kesehatan  | Jumlah kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat bidang<br>kesehatan Dinas<br>Kesehatan   | Banyaknya<br>kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>bidang kesehatan<br>Dinas Kesehatan  | $\Sigma$ kualitas<br>pemberdayaan<br>masyarakat<br>bidang kesehatan<br>Dinas Kesehatan  | Kepala Bidang<br>Kesmas            |  |
| 5,1   | Kegiatan Advokasi,<br>Pemberdayaan,<br>Kemitraan,<br>Peningkatan Peran<br>serta Masyarakat dan<br>Lintas Sektor Tingkat<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota | Terlaksananya<br>advokasi,<br>pemberdayaan,<br>kemitraan, peningkatan<br>peran serta masyarakat<br>dan lintas sektor<br>Tingkat daerah<br>kabupaten/ kota | Jumlah advokasi,<br>pemberdayaan,<br>kemitraan,<br>peningkatan peran<br>serta masyarakat<br>dan lintas sektor<br>Tingkat daerah<br>kabupaten/ kota | Banyaknya<br>advokasi,<br>pemberdayaan,<br>kemitraan,<br>peningkatan<br>peran serta<br>masyarakat dan<br>lintas sektor<br>Tingkat daerah<br>kabupaten/ kota | $\Sigma$ advokasi,<br>pemberdayaan,<br>kemitraan,<br>peningkatan<br>peran serta<br>masyarakat dan<br>lintas sektor<br>Tingkat daerah<br>kabupaten/ kota | Subkoord<br>Promkes                |  |
| 5.1.1 | Subkegiatan<br>Peningkatan Upaya<br>Promosi Kesehatan,<br>Advokasi, Kemitraan<br>dan Pemberdayaan<br>Masyarakat                                     | Terlaksananya<br>peningkatan upaya<br>promosi kesehatan,<br>advokasi, kemitraan<br>dan pemberdayaan<br>masyarakat   | Jumlah<br>peningkatan upaya<br>promosi kesehatan,<br>advokasi,<br>kemitraan dan<br>pemberdayaan<br>masyarakat                                      | Banyaknya<br>peningkatan<br>upaya promosi<br>kesehatan,<br>advokasi,<br>kemitraan dan<br>pemberdayaan<br>masvarakat   | $\Sigma$ peningkatan<br>upaya promosi<br>kesehatan,<br>advokasi,<br>kemitraan dan<br>pemberdayaan<br>masyarakat   | Subkoord<br>Promkes                |  |
| 5.1.2 | Subkegiatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna (TTG) sesuai<br>lokal spesifik daerah<br>dalam pengamanan<br>kualitas air minum<br>dan sanitasi aman         | Terlaksananya<br>teknologi tepat guna<br>(TTG) sesuai lokal<br>spesifik daerah dalam<br>pengamanan kualitas<br>air minum dan sanitasi<br>aman             | Jumlah teknologi<br>tepat guna (TTG)<br>sesuai lokal spesifik<br>daerah dalam<br>pengamanan<br>kualitas air minum<br>dan sanitasi aman             | Banyaknya<br>teknologi tepat<br>guna (TTG)<br>sesuai lokal<br>spesifik daerah<br>dalam<br>pengamanan<br>kualitas air minum<br>dan sanitasi aman             | $\Sigma$ teknologi tepat<br>guna (TTG)<br>sesuai lokal<br>spesifik daerah<br>dalam<br>pengamanan<br>kualitas air<br>minum dan<br>sanitasi aman          | Subkoord<br>Kesling dan<br>Kesjaor |  |
| 5,2   | Kegiatan<br>Pelaksanaan Sehat<br>dalam rangka<br>Promotif Preventif<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Terlaksananya<br>kegiatan sehat dalam<br>rangka promotif<br>preventif tingkat<br>daerah kabupaten/kota  | Jumlah kegiatan<br>sehat dalam rangka<br>promotif preventif<br>tingkat daerah<br>kabupaten/kota  | Banyaknya<br>kegiatan sehat<br>dalam rangka<br>promotif preventif<br>tingkat daerah<br>kabupaten/kota   | $\Sigma$ kegiatan sehat<br>dalam rangka<br>promotif preventif<br>tingkat daerah<br>kabupaten/kota   | Subkoord<br>Promkes                |  |
| 5.2.1 | Subkegiatan<br>Penyelenggaraan<br>Promosi Kesehatan<br>dan Gerakan Hidup<br>Bersih dan Sehat  | Terlaksananya<br>penyelenggaraan<br>promosi kesehatan dan<br>gerakan hidup bersih<br>dan sehat  | Jumlah<br>penyelenggaraan<br>promosi kesehatan<br>dan gerakan hidup<br>bersih dan sehat  | Banyaknya<br>penyelenggaraan<br>promosi<br>kesehatan dan<br>gerakan hidup<br>bersih dan sehat   | $\Sigma$<br>penyelenggaraan<br>promosi<br>kesehatan dan<br>gerakan hidup<br>bersih dan sehat  | Subkoord<br>Promkes                |  |
| 5,3   | Kegiatan<br>Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan<br>Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM)<br>Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota           | Terlaksananya<br>pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan bersumber<br>daya masyarakat<br>(UKBM) tingkat daerah<br>kabupaten/ kota              | Jumlah<br>pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan<br>bersumber daya<br>masyarakat<br>(UKBM) tingkat<br>daerah kabupaten/<br>kota        | Banyaknya<br>pengembangan<br>dan pelaksanaan<br>upaya kesehatan<br>bersumber daya<br>masyarakat<br>(UKBM) tingkat<br>daerah<br>kabupaten/ kota              | $\Sigma$ pengembangan<br>dan pelaksanaan<br>upaya kesehatan<br>bersumber daya<br>masyarakat<br>(UKBM) tingkat<br>daerah<br>kabupaten/ kota              | Subkoord<br>Promkes                |  |
| 5.3.1 | Subkegiatan<br>Bimbingan Teknis<br>dan Supervisi<br>Pengembangan dan<br>Pelaksanaan Upaya<br>Kesehatan<br>Bersumber Daya<br>Masyarakat (UKBM)       | Terlaksananya<br>bimbingan teknis dan<br>supervisi<br>pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan bersumber<br>daya masyarakat<br>(UKBM)           | Jumlah bimbingan<br>teknis dan supervisi<br>pengembangan dan<br>pelaksanaan upaya<br>kesehatan<br>bersumber daya<br>masyarakat<br>(UKBM)           | Banyaknya<br>bimbingan teknis<br>dan supervisi<br>pengembangan<br>dan pelaksanaan<br>upaya kesehatan<br>bersumber daya<br>masyarakat<br>(UKBM)              | $\Sigma$ bimbingan<br>teknis dan<br>supervisi<br>pengembangan<br>dan pelaksanaan<br>upaya kesehatan<br>bersumber daya<br>masyarakat<br>(UKBM)           | Subkoord<br>Promkes                |  |





**CATATAN HASIL REVIU**  
**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN BONDOWOSO**  
**TAHUN 2025 - 2029**

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 800.1.11.1 / 191 / DD / 430.8 / 2025 tanggal 1 September 2025 atas kegiatan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025 - 2029, dapat disampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

1. Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

| No | Catatan Hasil Reviu        | Rekomendasi                |
|----|----------------------------|----------------------------|
| 1. | <p><b>Error System</b></p> | <p><b>Error System</b></p> |

2. Keselarasan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dengan Bidang Urusan pada Perangkat Daerah

| No | Catatan Hasil Reviu | Rekomendasi   |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Telah Selaras       | Telah Selaras |

3. Konsistensi dan Keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

| No | Catatan Hasil Reviu | Rekomendasi   |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Telah Selaras       | Telah Selaras |

4. Konsistensi dan Keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

| No | Catatan Hasil Reviu | Rekomendasi   |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | Telah Selaras       | Telah Selaras |

5. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

| No | Catatan Hasil Reviu  | Rekomendasi   |
|----|--|---|
| 1. | <p>Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja masih belum disajikan dengan jelas baik pada aplikasi maupun pada fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah, diantaranya terdapat pada IKU berikut :</p> <p>Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup</p> <p>Angka Kematian Ibu (AKI)</p> <p>Nilai SAKIP</p> <p>Cakupan imunisasi bayi lengkap</p> <p>Cakupan kepesertaan jaminan</p> | Menyajikan Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja pada Aplikasi dan Fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah |

|   |  |
|---|--|
| <p>kesehatan nasional (JKN)</p> <p>Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan</p> <p>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita</p> <p>Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis</p> <p>Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna</p> <p>Angka Kematian Balita</p> <p>Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)</p> <p>Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna</p> |  |
|---|--|

6. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya

| No | Catatan Hasil Reviu  | Rekomendasi  |
|----|--|--|
| 1. | <p>Data Target Tahun Terakhir, Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja Periode Tahun Sebelumnya masih belum disajikan dengan jelas, baik pada aplikasi SIPD maupun pada fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah :</p> <p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> | <p>Menyajikan Data Target tahun Terakhir, Capaian Tahun Terakhir dan Prosentase Capaian Kinerja Periode tahun Sebelumnya pada Aplikasi SIPD dan Fisik Dokumen Rankhir Renstra Perangkat Daerah</p> |

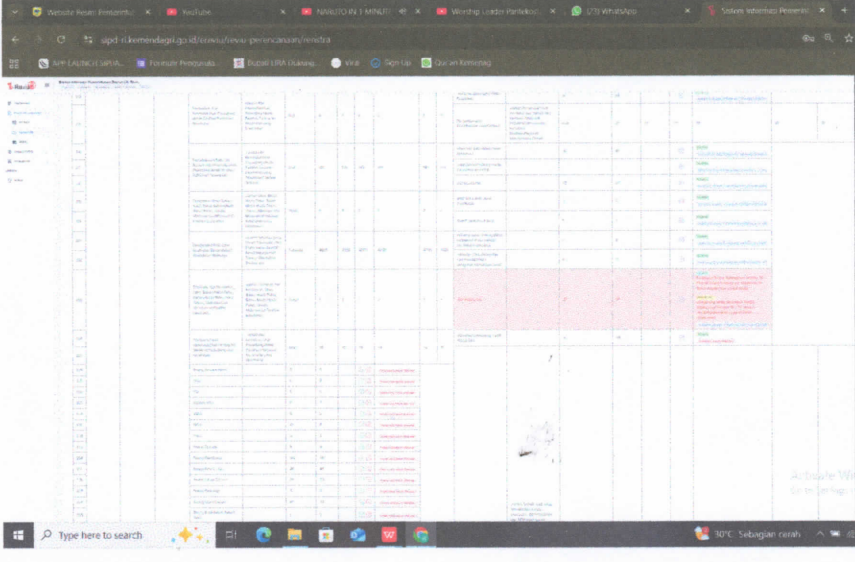


| No | Catatan Hasil Reviu   | Rekomendasi |
|----|---|-------------|
|    | <p>Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun</p> <p>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Cakupan penemuan kasus TB</p> <p>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun</p> <p>Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</p> <p>Persentase Laporan Keuangan yang disusun</p> <p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah</p> <p>Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional</p> <p>Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)</p> <p>Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu</p> <p>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase Apotek dan toko Obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan</p> <p>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan</p> |             |

| No | Catatan Hasil Reviu  | Rekomendasi |
|----|--|-------------|
|    | <p>sesuai standar</p> <p>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</p> <p>Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar</p> <p>Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun</p> <p>Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan</p> <p>Persentase lanjut usia yang mandiri</p> <p>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan</p> <p>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi</p> <p>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan</p> <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>Persentase Desa/Kelurahan sanitasi</p> |             |

| No | Catatan Hasil Reviu  | Rekomendasi |
|----|--|-------------|
|    | <p>total berbasis masyarakat</p> <p>Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat</p> <p>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi</p> <p>Persentase merokok penduduk 10-21 tahun</p> <p>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</p> <p>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</p> <p>Persentase penerbitan dan pemenuan komitmen SPP - IRT sesuai standar</p> <p>Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar</p> <p>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p> <p>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang disusun (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p> <p>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p> <p>Persentase Laporan Keuangan yang disusun (Rumah Sakit Umum DR. H. Koesnadi)</p> |             |

7. Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

| No | Catatan Hasil Reviu   | Rekomendasi                |
|----|---|----------------------------|
| 1. | <p><b>Error System</b></p>  | <p><b>Error System</b></p> |

Demikian untuk mendapat perhatian dan diharap agar menyampaikan tanggapan segera setelah disampaikannya Catatan Hasil Reviu ini.

Bondowoso, 15 September 2025

Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso,



Pengendali Teknis Tim Reviu,

Fenny Soegiarti, S.E.  
Pembina / IVb  
NIP 19790426 200312 2 005





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
DINAS KESEHATAN

Jalan Imam Bonjol No. 13, Bondowoso, Jawa Timur

Telepon (0332) 421341, Laman [dinkesbondowosokab.go.id](http://dinkesbondowosokab.go.id), Pos-el [dinkes@bondowosokab.go.id](mailto:dinkes@bondowosokab.go.id)

Bondowoso, 26 September 2025

Nomor : 000.7.3/ *AD36* /430.9.2/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Tindaklanjuti hasil reviu Rancangan Akhir  
Rencana Strategis pada Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bondowoso 2025 - 2029

Yth : Inspektur Kabupaten Bondowoso  
di  
Bondowoso

Menindaklanjuti catatan hasil reviu Rancangan Akhir Renstra pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 – 2029 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Catatan hasil reviu nomor 1 Keselarasan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan error system sudah dikoordinasikan dengan BP4D untuk perbaikan.
2. Catatan hasil reviu nomor 5 Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode sebelumnya terhadap capaian tahun terakhir, Prosentase capaian kinerja masih belum disajikan dengan jelas baik di aplikasi maupun dokumen fisiknya diantaranya Proporsi aktivitas penduduk dengan aktivitas fisik cukup, AKI, Nilai Sakip, Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap, Cakupan Kepesertaan JKN, Persentase peningkatan kompetensi SDM Kesehatan, Persentase penderita HT mendapatkan layanan sesuai standar, Prevalensi stunting, Persentase pemeriksaan gratis, Persentase sediaan farmasi, Alkes dan Makmin, IKM, Persentase RS dengan akreditasi paripurna, Angka kematian balita, Angka keberhasilan pengobatan TB dan Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna telah diperbaiki di dokumen Renstra Dinkes dan Aplikasi SIPD.
3. Catatan hasil reviu nomor 6 Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya terhadap Data target dan capaian tahun terakhir, dan Prosentase capaian kinerja periode tahun sebelumnya masih belum disajikan dengan jelas baik di SIPD dan dokumen fisik Renstra diantaranya : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar, Persentase orang terduga TBC



mendapatkan pelayanan sesuai standar, Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun, Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan, Persentase lansia yang mandiri, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan, Persentase orang dengan resiko HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar, Rasio tenaga Kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar, Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diperdayakan, Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar, Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan, Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat, Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi, Persentase merokok penduduk 10 -21 tahun, Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan, Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar, Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar, Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (RSUD dr koesnadi), Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun (RSUD dr koesnadi), Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi (RSUD dr koesnadi), Persentase laporan keuangan yang disusun (RSUD dr koesnadi), Prevalensi depresi dibawah umur 15 tahun, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, Cakupan penemuan kasus TB, Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun, Cakupan kepesertaan aktif JKN, Persentase laporan keuangan yang disusun, Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari linsek yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional, Cakupan kepesertaan JKN, Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang dengan usia 15 – 50 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan. Telah diperbaiki di dokumen Renstra dan di SIPD.

4. Catatan hasil reviu nomor 7 Keselarasan Penetapan Target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah dengan error system di aplikasi telah ditindaklanjuti dengan BP4D.

Demikian untuk menjadi periksa atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Bondowoso



Agus Winarno, SE., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800818 200312 1 002